University Library

MINERVA ACCESS

A gateway to Melbourne's research publications

Minerva Access is the Institutional Repository of The University of Melbourne

Author/s:
Prabaningrum, G.;Abheseka, N.M.R.

Title:
Peningkatan Kapasitas Politik Perempuan dan Advokasi untuk Mengakses Alokasi Dana Desa melalui Sekolah Perempuan = Increasing Women's Political Capacities and Advocacy for Accessing Village Fund Allocations through the Women's School

Date:
2020

Citation:
Prabaningrum, G. & Abheseka, N.M.R. (2020). Peningkatan Kapasitas Politik Perempuan dan Advokasi untuk Mengakses Alokasi Dana Desa melalui Sekolah Perempuan = Increasing Women's Political Capacities and Advocacy for Accessing Village Fund Allocations through the Women's School. In Savirani, A. & Diprose, R. & Hartoto, A.S. & Setiawan, K.M.P. (Eds.), Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-Undang Desa (pp. 111-136). University of Melbourne with Universitas Gadjah Mada and MAMPU.

Persistent Link:
https://hdl.handle.net/11343/268255

Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Peningkatan Kapasitas Politik Perempuan dan Advokasi untuk Mengakses Alokasi Dana Desa melalui Sekolah Perempuan

Increasing Women's Political Capacities and Advocacy for Accessing Village Fund Allocations through the Women's School

Penulis

Galih Prabaningrum dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka

Editor dan Pengulas Naskah
Volume Editors and Reviewers
Amalinda Savirani
Rachael Diprose
Annisa Sabrina Hartoto
Ken M.P. Setiawan

Penyunting dan Penerjemah Naskah
Copy Editors
Annisa Sabrina Hartoto
Bronwyn Beech Jones

Untuk merujuk studi kasus ini:

Prabaningrum, G., dan Abheseka, N.M.R., 2020. Peningkatan Kapasitas Politik Perempuan dan Advokasi untuk Mengakses Alokasi Dana Desa melalui Sekolah Perempuan [Increasing Women's Political Capacities and Advocacy for Accessing Village Fund Allocations through the Women's School]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU: Jakarta, hal. 111-136. https://doi.org/10.46580/124328. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia dan Orang, dan dilakukan melalui konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil yang terlibat. Kami menghaturkan terima kasih kepada organisasi-organisasi ini, dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) atas dukungan mereka, serta kepada para partisipan penelitian, terutama para perempuan desa yang telah membagikan pengalaman dan pandangan mereka dengan kami. Isi dari publikasi ini merupakan hasil analisis dan pandangan para penulis, dan belum tentu merefleksikan pandangan dari pemerintah dan organisasi yang terlibat. Isi dari studi kasus ini di masa depan dapat diubah untuk merefleksikan lebih jauh hasil dan analisis penelitian seiring waktu berjalan. Untuk analisis yang lebih menyeluruh dan komparatif dari semua studi kasus, lihat Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., dan Francis, N., 2020. Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Orang. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, dan MAMPU. https://doi.org/10.46580/124327. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

To cite this case study:

Prabaningrum, G., dan Abheseka, N.M.R., 2020. Peningkatan Kapasitas Politik Perempuan dan Advokasi untuk Mengakses Alokasi Dana Desa melalui Sekolah Perempuan [Increasing Women's Political Capacities and Advocacy for Accessing Village Fund Allocations through the Women's School]. In A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, and K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada and MAMPU, pp. 111-136. https://doi.org/10.46580/124328. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

This research was supported by the Governments of Australia and Indonesia, and was conducted in consultation with the civil society organisations involved. We would like to thank these organisations and the Australia-Indonesia Partnership for Women's Empowerment and Gender Equality (MAMPU) for their support, as well as all participants in the research, in particular the countless village women who shared their experiences and views with us. The views expressed in the analysis are those of the authors alone and do not necessarily reflect the views of the supporting governments or organisations. Future iterations of this case study might reflect further research and analysis over time. For a more extensive and comparative analysis of the case studies, see Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., and Francis, N., 2020. Women's Collective Action and the Village Law: How Women are Driving Change and Shaping Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada, and MAMPU. https://doi.org/10.46580/124326. Available at: www.mampu.or.id and www.demisetara.org.

Ucapan Terima Kasih

Tim editor ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim peneliti lapangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam penelitian dan penulisan studi kasus mengenai aksi kolektif perempuan dan Dana Desa di Indonesia ini: Anastasia Imelda Cahyaningrum, Azifah R. Astrina, Bellicia Angelica Tanvil, Desi Rahmawati, Devy Dhian Cahyati, Galih Prabaningrum, Hening Wikan Sawiji, Indah Surya Wardhani, Longgina Novadona Bayo, Mustaghfiroh Rahayu, Nadlirotul Ulfa, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, Smita Tanaya, Ulya Niami Efrina Jamson, dan Wigke Capri.

Volume studi kasus ini terwujud melalui kerja LSM-LSM yang terlibat yang berkomitmen penuh untuk mendukung dan membimbing perempuan di desa di seluruh Indonesia. Setiap hari para kader, staf, dan pendamping lapangan bergerak bahu membahu bersama perempuan desa untuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan serta membentuk kebijakan, inisiatif, dan pendekatan untuk pemberdayaan perempuan. Para editor dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf organisasi atas partisipasi mereka dalam workshop perencanaan dan analisis kolaboratif yang diselenggarakan dalam proses penelitian ini, dukungan yang diberikan selama penelitian di lapangan, beserta waktu yang mereka sediakan untuk wawancara. Kami sangat menghargai kolaborasi yang terbentuk dengan organisasi di level nasional: ‘Aisyiyah, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), Forum Pengada Layanan (FPL), Institut KAPAL Perempuan, Migrant CARE, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), PERMAMPU, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) serta mitra subnasional mereka — Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM, mitra lokal KAPAL Perempuan di Pangkajene dan Kepulauan), Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU, mitra FPL di NTT), DAMAR Lampung (mitra PERMAMPU di Lampung), Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu (mitra FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara), Perkumpulan Panca Karsa di Mataram (PPK, mitra Migrant CARE di Lombok Tengah, NTB), dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K, mitra KAPAL Perempuan di Jawa Timur).

Apresiasi juga kami sampaikan kepada Astutik Supraptini dan Stewart Norup, yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga terkait penyusunan dokumen ini, dan juga kepada segenap tim MAMPU atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian dan diseminasi hasilnya, terutama Amron Hamdi, Dhina M. Kartikasari, Atik Dewi, Deasy Widjajanti, Arsi Nurwaskito, Krisdeny Mahajaya dan Kate Shanahan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada semua partisipan dalam penelitian ini, yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Pandangan, pengetahuan dan pengalaman semua perempuan yang berada di dalam bunga rampai ini kami harapkan dapat terus memberikan pelajaran dan inspirasi bagi upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Ringkasan

Studi kasus ini menggambarkan perubahan yang terjadi di sebuah desa di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik dengan terbentuknya Sekolah Perempuan, sebuah sekolah informal bagi perempuan desa, melalui dukungan dari Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K). Pembentukan kelompok Sekolah Perempuan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dialami oleh perempuan miskin di desa, yang meliputi terbatasnya akses perempuan dalam ranah kebijakan publik, baik dalam hal pemenuhan pendidikan maupun dalam akses terhadap sektor ekonomi, serta minimnya akses perempuan terhadap bantuan sosial untuk peningkatan ekonomi perempuan miskin. Kondisi geografis desa menjadi salah satu penyebab sulitnya akses masyarakat untuk ke luar desa, yang berpengaruh pada akses mereka terhadap pelayanan dasar serta jaminan hak-hak dasar mereka. Selain itu, norma sosial masyarakat menempatkan posisi laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan.

Keberadaan Sekolah Perempuan telah membawa beberapa perubahan signifikan bagi kehidupan sehari-hari perempuan di desa lokasi penelitian. Kegiatan Sekolah Perempuan terdiri dari pelatihan, berkumpul dan berdiskusi, serta advokasi. Secara individual, melalui kegiatan-kegiatan ini, anggota kelompok Sekolah Perempuan mampu meningkatkan pengetahuan, dan keahlian, serta menguatkan kapasitas diri dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan di desa. Perempuan juga terdorong untuk memikirkan dan mengkonfigurasi ulang relasi gender di dalam rumah tangga dan juga di masyarakat secara lebih luas. Secara kolektif, hal ini memberikan kesempatan bagi perempuan desa untuk menjalin jaringan baru sesama perempuan, serta membuka ruang partisipasi perempuan yang lebih lebar di ruang publik, yang ditunjukkan dengan keterlibatan mereka di dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Peningkatan kapasitas politik perempuan juga memberikan bekal bagi mereka untuk memperjuangkan alokasi Dana Desa untuk mendukung kegiatan Sekolah Perempuan. Selain itu, perempuan desa juga terlibat dalam usaha advokasi legalitas keberadaan Sekolah Perempuan melalui perancangan Peraturan Desa.

Meningkatnya peran perempuan dalam proses pemerintahan di desa tidak terlepas dari keberhasilan upaya advokasi yang dilakukan dalam memperjuangkan alokasi Dana Desa untuk kegiatan Sekolah Perempuan. Karena upaya awal advokasi ini mendapat penolakan dari pemerintah desa, anggota Sekolah Perempuan lalu melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten guna memperoleh dukungan. Pemerintah kabupaten, yang sebelumnya sudah berkomitmen untuk mendukung kegiatan kelompok Sekolah Perempuan, memberikan tekanan pada pemerintah desa agar mengalokasikan anggaran bagi Sekolah Perempuan. Aksi kolektif berjaringan ini membuahkan hasil dalam hal akses terhadap Dana Desa, seiring dengan berlanjutnya upaya advokasi di tingkat desa dalam mengupayakan institusionalisasi Sekolah Perempuan melalui peraturan desa. Di tingkat kabupaten, anggota Sekolah Perempuan memberikan usulan kepada tokoh yang berpengaruh di kabupaten agar lebih berkomitmen terkait isu kesehatan perempuan dan penghapusan perkawinan anak. Usulan ini mendorong diterbitkannya peraturan daerah yang melarang praktik perkawinan anak, dan juga peraturan yang mengatur pembentukan forum Musrenbang khusus perempuan.

Terjadinya perubahan-perubahan ini didukung oleh adanya fasilitasi dan pendidikan yang dilakukan oleh CSO lokal yaitu KPS2K yang berbasis di Sidoarjo. KPS2K menempuh kombinasi jalur *bottom up* dan *top down* untuk mendorong partisipasi perempuan miskin melalui Sekolah Perempuan dan dalam memastikan Sekolah Perempuan mendapatkan pendanaan melalui Dana Desa agar dapat berlanjut secara jangka panjang. Di level desa, KPS2K melakukan penguatan akar rumput untuk mendorong peningkatan pengetahuan dan partisipasi perempuan di ranah publik. Pada level kebijakan di tingkat kabupaten, KPS2K melakukan pemetaan struktur kekuasaan, mengidentifikasi aktor kunci yang kemudian didekati secara formal maupun informal.

Sebagai gerakan kolektif perempuan, Sekolah Perempuan menghadapi tantangan baik yang bersifat internal organisasi, ataupun tantangan eksternal dari anggota masyarakat khususnya laki-laki, karena kegiatan Sekolah Perempuan menuntut perubahan norma sosial terkait peran perempuan di masyarakat. Namun demikian, peluang kesinambungan Sekolah Perempuan di desa tercipta dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah mereplikasi Sekolah Perempuan di desa-desa lainnya di Kabupaten Gresik. Hal ini memperlihatkan bahwa kelompok Sekolah Perempuan diakui berhasil untuk meningkatkan kapasitas perempuan miskin desa untuk terlibat di dalam proses pengambilan keputusan di desa agar dapat memperjuangkan akomodasi hak-hak dan kebutuhan dasarnya dalam kebijakan publik.

Summary

This case study illustrates changes in a village in Gresik after the formation of a Women's School (Sekolah Perempuan) group supported by the Women's Groups and Sources of Life organisation (*Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan* - KPS2K). This Women's School group was formed to respond to problems experienced by poor women in the village, including women's limited access to the public policy making sphere, education, economic opportunities, and government social protection programs. The geographical location of the village has also created difficulties for people to travel outside of the village, thus limiting their access to basic services and to fulfil their rights. Local social norms have also restricted women's mobility and involvement in public decision making.

Through participating in training sessions, group discussions and advocacy activities, members of the Women's School group have strengthened their individual skills, knowledge, capacity to exercise influence in the village and encourage new thinking about how to reconfigure gender relations in households and more widely. Women have created new networks and opened up opportunities for the wider participation of women in the public sphere, demonstrated by their increased involvement in village development planning meetings.

This increasing role of women in village governance has underpinned successful advocacy efforts for changes to Village Regulations on the use of the Village Budget (APBDes) so as to provide an allocation from the Village Fund for the Women's School group. Initially such calls were rejected by the village government, so Women's School members leveraged their growing connections with the district government to lobby for support. The district government – which had committed to supporting Women's School groups – exerted pressure on the village government which, in turn, allocated some funding to the group. Such networked collective action saw results in accessing the Village Fund, although advocacy continues in the village for the institutionalisation of the Women's School through a Village Regulation. At the district level, Women's School members also made recommendations to influential district actors to make greater investments in women's health issues and against child marriage. This resulted in the enactment of a District Regulation (*Perda*) prohibiting child marriage and the establishment of a special development planning forum (Musrenbang) for women.

These changes have been supported by KP2SK's community-building and education programs. KPS2K took a combination of bottom up and top down approaches to encourage the participation of women from disadvantaged backgrounds in the Women's Schools and to garner support for these Schools to be funded over the longer term at the village level through the village budget. In the Gresik research village, KP2SK has taken a grassroots approach to increase women's knowledge of their civic and social rights and their participation in the public sphere. To effect policy change at the district level, KPS2K mapped power structures in order to identify key actors who they then approached both formally and informally.

As a women's collective, the Women's School faces challenges and some resistance from men in the community in particular, both for the group and for the individuals within it, as it challenges gender norms on women's roles in the community. Despite these ongoing challenges, support from the district government has funded the replication of Women's Schools in villages throughout the district. This expansion shows that Women's School groups have been recognised as successfully increasing the capacity of poor rural women to be involved in village decision-making processes and to fight for their basic rights and needs to be fulfilled in public policy and programs.

Pendahuluan

Studi kasus ini berfokus pada bagaimana Sekolah Perempuan yang didirikan oleh Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K)[1] membawa peluang bagi penguatan kapasitas perempuan dan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan desa di desa penelitian di Kabupaten Gresik.[2] Masalah kemiskinan dan norma sosial yang berlaku di masyarakat membatasi gerak perempuan di ranah publik, termasuk untuk memperoleh pendidikan atau untuk menyampaikan aspirasinya di musyawarah desa. Dalam pendirian Sekolah Perempuan, KPS2K menggunakan dua strategi *bottom up approach* dan *top down approach*, baik di level kabupaten maupun di level desa. Kegiatan-kegiatan yang diadakan Sekolah Perempuan telah membantu perempuan menumbuhkan keberanian untuk menyampaikan di depan umum, meningkatkan kemampuan berorganisasi, serta menegosiasikan relasi kuasa, terutama dengan suami.

Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang didapat dari Sekolah Perempuan, perempuan desa memiliki wadah untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam memahami dan memetakan masalah yang menimpa mereka. Perempuan desa juga memperoleh pengetahuan lebih jauh mengenai ketidakadilan gender yang selama ini mereka alami sehari-hari. Selain itu, keberadaan Sekolah Perempuan menumbuhkan kepercayaan diri perempuan dan membekali mereka dengan keterampilan kepemimpinan. Di Sekolah Perempuan pun ditekankan bahwa perempuan memiliki peran sebagai agen perubahan demi kepentingan mereka sendiri melalui partisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

> *"Tapi saya sadar Mbak, karena sudah melakukan pembelajaran di Sekolah Perempuan karena saya punya hak juga. Kalau saya tidak segera dirujuk ke rumah sakit, kan yang merasakan sakit kan saya. Jadi kan saya berhak mengambil keputusan untuk saya menjadi sehat. Nah itu kan pendidikan itu kan ada di Sekolah Perempuan itu. Bukan menjadi pemimpin di publik, tapi menjadi pemimpin dalam dirinya sendiri. Dalam mengambil keputusan, seperti itu sih." (Endang, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

> *"Kalau goals-nya ya sebenarnya kalau di program kan mereka bisa memantau ini jaminan kesehatan. Jadi ya di samping kualitas hidupnya meningkat, dia punya perspektif adil gender, terus kesadaran terhadap haknya itu tumbuh, kemudian dia juga bisa mengakses pembangunan yang di situ sesuai kebutuhan dia, kebutuhan perempuan." (Ajeng, Staf KPS2K, Sidoarjo, 6 Maret 2019)*

Studi kasus ini terdiri dari tujuh bagian. Bagian pertama menggambarkan konteks umum kondisi desa. Bagian kedua mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan desa. Bagian ketiga menguraikan tentang pendirian Sekolah Perempuan. Bagian keempat menjelaskan bagaimana peningkatan kapasitas perempuan terjadi melalui kegiatan Sekolah Perempuan di desa, serta bagaimana perempuan desa melakukan upaya advokasi legalitas Sekolah Perempuan melalui adanya peraturan desa. Bagian kelima menggambarkan strategi pendekatan dan pendampingan yang dilakukan oleh KPS2K untuk membangun kesadaran mengenai keadilan gender. Bagian keenam menjabarkan mengenai tantangan dan peluang bagi keberadaan Sekolah Perempuan. Bagian ketujuh membahas mengenai langkah selanjutnya untuk mendukung keberlanjutan Sekolah Perempuan yang sudah ada dan mereplikasi Sekolah Perempuan di desa lainnya.

1. Konteks Sosial dan Ekonomi Desa

Desa ini merupakan salah satu dari 16 desa di Kecamatan Wringinanom yang berada di dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Gresik dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo. Secara geografis, lokasi

[1] KPS2K merupakan singkatan dari Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan. KPS2K merupakan kelompok yang mempunyai fokus pada pengembangan isu pendidikan perempuan. KPS2K merupakan mitra dari Institut KAPAL Perempuan dalam menjalankan program Gender Watch dengan mengembangkan Sekolah Perempuan di mana terdapat penguatan kapasitas perempuan miskin agar terbangun kesadaran kritis. Ada 4 (empat) aspek yang dipantai dalam program "Gender Watch" yaitu kebijakan, penganggaran, serta kelembagaan dan mekanisme program kerja.

[2] Semua nama yang digunakan di dalam studi kasus ini telah disamarkan dan bukan nama sebenarnya.

desa ini berjarak sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten Gresik, dan justru lebih dekat jaraknya ke Kabupaten Sidoarjo. Jarak tempuh dari jalan utama ke pusat desa sekitar 10 km. Kondisi jalan yang menghubungkan antar desa sudah beraspal sedangkan jalan antar-dusun sebagian sudah dipasangkan *paving block* dan sebagian lain masih berupa tanah. Struktur tanah yang kurang stabil menyebabkan jalan antar-dusun menjadi bergelombang dan berlubang. Selain itu, sarana transportasi umum yang terbatas menghambat mobilitas perempuan miskin desa, termasuk untuk mengakses program perlindungan sosial atau untuk menuju ibu kota Kabupaten Gresik. Karena jarak desa yang lebih dekat dengan Kabupaten Sidoarjo, warga pun lebih memilih untuk mengakses pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan dan pasar di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai akibat perbedaan domisili, mereka tidak dapat memakai program perlindungan sosial seperti BPJS di fasilitas kesehatan di wilayah Sidoarjo, karena fasilitas ini tergantung dari domisili kependudukan warga.

Dari segi luas, desa ini merupakan terluas ketiga di Kecamatan Wringinanom, dengan luas wilayah sebesar 5,14 km^2. Sebagian besar wilayah merupakan lahan pertanian, sesuai dengan mata pencaharian mayoritas warga desa sebagai petani atau buruh tani. Selain di sektor agraria, warga desa ini bekerja sebagai buruh pabrik di sub-sektor plastik dan kemasan, tekstil dan garmen, maupun makanan dan minuman, mengingat posisi desa yang dekat dengan kawasan industri (BPS, 2018). Upah warga yang bekerja sebagai buruh pabrik berbeda-beda disesuaikan dengan status pekerja (borongan/ tetap) dan beban kerja. Pekerja perempuan rata-rata memperoleh Rp40 ribu/hari sementara laki-laki mendapatkan upah Rp50 ribu/hari karena beban kerja yang ditanggung oleh laki-laki dianggap lebih besar daripada beban kerja pekerja perempuan.[3]

Kemiskinan termasuk salah satu permasalahan utama di desa. Pada tahun 2013-2014 terdapat 719 kepala keluarga (KK) dari total 1861 KK termasuk kategori keluarga prasejahtera, atau sekitar 38 persen (RPJMDes, 2014). Sedangkan berdasarkan *Participatory Research Action* yang dilakukan oleh KPS2K pada tahun 2015, sekitar 32 persen warga termasuk keluarga miskin, yaitu 618 KK dari total 1886 KK di desa. Tingginya tingkat kemiskinan di desa membuat masyarakat desa cenderung memilih menghabiskan waktunya untuk kegiatan yang membawa penghasilan dibandingkan untuk kegiatan sosial.

Dihadapkan dengan kondisi infrastruktur yang buruk dan tingginya tingkat kemiskinan di desa, pemerintah desa masih mengutamakan alokasi anggaran desa untuk pembangunan fisik atau infrastruktur, daripada untuk pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di desa. Berdasarkan RPJMDes tahun 2018, sebesar 40% anggaran desa dialokasikan untuk pembangunan fisik, khususnya untuk memasang *countblock/paving* jalan, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 20%.[4] Argumen yang dibangun oleh pemerintah desa adalah pembangunan fisik dapat meningkatkan keterjangkauan akses dan mobilitas masyarakat sehingga dapat menunjang produktivitas ekonomi warga.

> *"Yang pertama prioritas kita di desa, karena kita desa membangun, jadi yang pasti jalan cor desa untuk peningkatan jalan lingkungan dan sebagainya untuk peningkatan produktivitas warga. Jadi kayak jalan tani, irigasi itu kan karena porsinya Dana Desa itu lebih besar untuk pembangunan tapi pemberdayaan pun kita kedepankan dengan tidak mengesampingkan pembangunan itu sendiri." (Sutopo, Sekretaris Desa, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)*

Secara kultural, norma sosial yang berlangsung secara turun-menurun cenderung menjadikan laki-laki berada pada posisi dominan baik di ranah keluarga dan di ruang publik, termasuk dalam pengambilan keputusan formal di level desa. Dalam struktur pemerintah desa di desa ini, sudah terdapat representasi perempuan, namun lebih banyak ditempatkan dalam pekerjaan administratif. Awalnya, perempuan yang duduk dalam struktur pemerintah desa terpilih menjadi kepala dusun. Namun pemerintah desa memiliki pertimbangan

[3] Siti, Perempuan Desa, desa penelitian di Gresik, 24 Februari 2019.
[4] https://gresikkab.go.id/sidesa/desa_kesambenkulon.

bahwa kepala dusun lebih banyak berinteraksi dengan warga dan posisi tersebut lebih cocok dilakukan oleh laki-laki, maka terjadilah restrukturisasi. Perempuan yang terpilih sebagai kepala dusun tersebut bertukar posisi dengan posisi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang mulanya dijabat oleh laki-laki.

Data desa menyatakan bahwa dari total 5.562 penduduk, sejumlah 1.257 tidak pernah bersekolah, 1.050 tidak tamat SD, 1.024 tamat SD/sederajat, 998 tamat SMP/sederajat, dan sisanya merupakan tamatan SMA/sederajat dan tamatan perguruan tinggi (RPJMDes, 2014). Dari data tersebut, rata-rata pendidikan perempuan miskin desa merupakan lulusan SMP/atau Sekolah Dasar.[5] Kondisi ini terjadi karena norma sosial menempatkan perempuan dalam peran terkait ranah domestik dalam keluarga, sehingga tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Selain itu masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa pendidikan tinggi tidak akan mengubah kehidupan mereka secara signifikan. Ketika anak-anak lulus SMA atau perguruan tinggi mereka akan kembali ke desa dan akan bekerja di sawah atau menjadi buruh pabrik.

> "*Dulu saya beranggapan kalau perempuan sudah berumah tangga yang namanya urusan di luar rumah tangga itu sudah terputus. Kayak seakan-akan itu hidup seorang perempuan itu ya cuman di lingkup rumah tangga saja. Kayak misalnya ya itulah Mbak, di kasur, di sumur, di dapur ya semacam itu." (Lasinem, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)*

Persepsi tersebut menimbulkan tekanan besar bagi perempuan. Ada warga yang masih meyakini bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena nantinya akan mengurus rumah tangga dan keluarga. Akhirnya banyak anak perempuan dinikahkan saat usia sekolah. Sedangkan anak laki-laki perlu sekolah tinggi karena akan menjadi sumber ekonomi bagi keluarganya ketika sudah menikah.

> "*Kalau dulu iya memang kan itu hak ya hak perempuan ya dibandingkan pasti sama saja sama laki-laki kan sebelumnya. Tapi kenyataannya kan nggak, di sini kan kebanyakan itu yang diprioritaskan untuk pendidikan tinggi kan laki-laki. Karena laki-laki menurut mereka kan pencari nafkah utama sedangkan perempuan kan nggak. Seperti itu, mungkin itu ya Mbak dari segi pendidikan." (Lasinem, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)*

Saat ini warga mulai sadar mengenai pentingnya pendidikan. Mereka berusaha menyekolahkan anaknya setidaknya hingga SMA dan bagi mereka yang secara usia sudah tidak memungkinkan mencoba untuk mengikuti kejar paket pendidikan. Perubahan ini salah satunya didorong oleh kebijakan yang diterapkan pabrik yang mensyaratkan minimal pekerjanya memiliki ijazah SMA.

> *"Perubahane, dulu kan anak saya nggak mau sekolah. Sekarang ada Sekolah Perempuan, suruh pelatihan di Bojonegoro, langsung saya ikutkan. Jadi tahu bengkel, mesin. Ada peningkatan." (Susanti, perempuan desa, desa penelitian di Gresik, 24 Februari 2019)*

> *"Kalau anak saya, diarahkan mbak. Kalau saya punya prinsip itu dari SMP harus diatur, ono minat kuliah ora [ada minat kuliah tidak]. Nek ora ono yo tak minatke ning SMK [kalau tidak ada ya aku arahkan ke SMK], kejuruan, punya keterampilan. Kalau masih mau kuliah, saya kasihkan ke umum." (Mansyur, Lelaki Desa, desa penelitian di Gresik, 2 Maret 2019)*

> *"Di sini kan banyak industri pabrik mbak, terus kan minimal pendidikan SMA. Kalo mau kerja kan kalo SMP kebanyakan ngga ada, kebanyakan SMA. Makanya saya bilang tadi itu pendidikan. Tapi kesehatan juga, tapi kan kalo kesehatan masih bisa diminta surat keterangan miskin, kalo darurat. Tapi kan kalo pendidikan ngga bisa." (Yasin, Laki-laki warga desa, desa penelitian di Gresik, 3 Maret 2019)*

[5] Sekretaris Desa, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019.

2. Permasalahan Perempuan Desa

Populasi perempuan di desa ini merupakan terbesar kedua di antara desa-desa lain di Kecamatan Wringinanom. Perempuan di desa studi kasus ini mengalami permasalahan kemiskinan dengan kompleksitas tinggi. Kemiskinan perempuan di desa ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan, adanya praktik perkawinan anak, domestifikasi perempuan, dan rendahnya partisipasi perempuan di dalam pemerintahan.

Rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan

Karena pendidikan bagi kaum perempuan belum menjadi prioritas masyarakat, perempuan tidak mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup, yang berpengaruh pada akses mereka terhadap lapangan pekerjaan. Praktik ketidakadilan dalam hal kesempatan untuk memperoleh pendidikan sudah dirasakan perempuan sejak kecil. Rata-rata perempuan desa bersekolah hanya hingga tingkat SMP, sementara laki-laki hingga tingkat SMA.[6] Masalah ekonomi menjadi faktor utama mengapa banyak perempuan tidak mampu melanjutkan pendidikan lebih tinggi walaupun yang bersangkutan masih ingin sekolah. Dalam satu keluarga jika memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka yang mendapatkan prioritas untuk pendidikan adalah laki-laki. Hal ini diperkuat oleh stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena pada akhirnya hanya akan mengurus "dapur".

> *"Di sini kan kebanyakan yang diprioritaskan pendidikan tinggi kan laki-laki. Karena laki-laki menurut mereka kan pencari nafkah utama sedangkan perempuan kan nggak." (Lasinem, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)*

Praktik Perkawinan Anak

Di Kecamatan Wringinanom ini angka perkawinan anak relatif tinggi.[7] Kondisi ini juga banyak terjadi di desa studi, bahkan banyak warga dari desa lain yang melakukan perkawinan anak di desa ini karena adanya kelonggaran dari pemerintah desa terkait pelaksanaan perkawinan anak.[8] Pemerintah desa studi cenderung longgar karena beberapa pertimbangan, misalnya terjadi kehamilan di luar nikah atau adanya keinginan anak untuk segera menikah, sehingga mereka berpendapat lebih baik dinikahkan daripada berzina. Faktor keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan juga secara tidak langsung turut berpengaruh terhadap tingginya praktik perkawinan anak. Ketika perempuan tidak dapat melanjutkan sekolah, maka jalan satu-satunya adalah menikah. Selain itu, terdapat stigma yang berkembang di masyarakat di mana anak perempuan yang cepat laku (menikah) maka akan semakin baik (dalam bahasa sehari-hari warga disebut 'laris'). Sebaliknya, apabila lambat menikah akan mendapatkan stigma negatif sebagai 'perawan tua' atau 'perempuan tidak laku'. Stigma ini sangat menekan para perempuan. Lebih lanjut, menikah cepat dikatakan dapat menaikkan derajat orang tua. Oleh karena itu, ada pula perempuan yang sejak usia sekolah sudah dijodohkan oleh orang tuanya.

> *"Karena saya umur 17 tahun sudah menikah, nah itu menurut saya biasa aja. Iya, kan laris. Iya. Karena kan keluarga saya dari saya, ibu saya, nenek saya, itu menikah di usia anak." (Endang, Perempuan Desa, desa penelitian di Gresik, 18 Februari 2019)*

> *"Jadi kalau di sini itu Mbak, orang tua itu beranggapan, anaknya yang paling laku itu anaknya yang paling cantik. Kalau nanti nggak laku-laku itu nanti dicap sebagai perawan tua, gitu." (Lastri, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 18 Februari 2019)*

---

[6] Lastri, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019.
[7] Angka perkawinan anak di Kecamatan Wringinanom pada tahun 2016 mencapai 1.329, sedangkan pada tahun 2017 mencapai 821. Diakses pada https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/02/02/45658/nikah-dini-janda-gresik-makin-banyak.
[8] Staf KPS2K, Sidoarjo, 6 Maret 2019.

> *"Soalnya diputuskan untuk menikah. Sejak SD sudah diputuskan. Perjodohan, orang tua. Bulan Juni lulus SLTP, bulan Julinya langsung pasang tenda. Langsung. Jadi lulus tahun 2000, menikahnya ya tahun 2000." (Susi, Perempuan Desa, desa penelitian di Gresik, 24 Februari 2019)*

> *"Nikah umur 13, punya anak umur 15. Saya dijodohkan. Tinggal 4 hari di pondok, langsung diambil, disuruh nikah. Lulus SD langsung ke pondok, langsung dibawa pulang diajak menikah. Wajah suami kayak apa nggak tau Mbak. Empat hari lagi sudah diambil nikah gitu. Suaminya orang Mojokerjo. Itu yang dijodohkan." (Nining, Perempuan Desa, desa penelitian di Gresik, 24 Februari 2019)*

Perkawinan anak dan kemiskinan merupakan dua permasalahan yang saling berkelindan. Pada satu sisi, kemiskinan menciptakan adanya perkawinan anak, di sisi yang lain perkawinan anak pun pada akhirnya menciptakan kemiskinan. Kondisi ini menandakan bahwa kemiskinan memang mengakar di masyarakat, di mana rata-rata pernikahan terjadi tanpa kesiapan, baik kesiapan ekonomi, pengetahuan, maupun kesiapan rohani.

> *"Dulu itu saya sampai sekarang sih Mbak, saya itu termasuk keluarga yang nggak kaya-kaya banget. Terus saya itu nggak berfikir panjang pokoknya saya menikah, saya nggak ikut KB, saya langsung hamil terus USG [Ultrasonography] itu kan nggak kayak sekarang kan Mbak. Sekarang kan diwajibkan USG kalau hamil dulu kan enggak. Terus kan saya juga nggak punya uang saya nggak USG. Jadi saya taunya anak kembar saya itu pas waktu lahiran. …Sudah keluar satu terus Mbaknya bilang katanya tinggal satu lagi. Iya sempat dulu panik tuh. Terus yang namanya saya dulu itu gimana ya Mbak, anak punya anak gitu loh. Jadi kan, secara saya kan masih anak-anak Mbak. Terus, apa ya, ekonomi rendah langsung sama bener-bener dikasih anak dua, suami saya nggak bekerja cuman buruh tani yang dulu itu cuman bayarannya tuh Rp11 ribu satu hari. Itu bisa dibayangkan dengan dua anak Mbak, belum juga saya tuh nggak punya sawah ya harus beli beras, kebutuhan sehari-hari, belum lagi kebutuhan anak dua. Saya juga minim ilmu masalah merawat anak."(Lasinem, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)*

Domestifikasi Perempuan

Rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan dan adanya praktik perkawinan anak di masyarakat memunculkan persoalan lain, yaitu rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan. Praktik perkawinan anak tanpa diimbangi dengan bekal kesiapan yang cukup, terutama bekal ekonomi, menyebabkan munculnya persoalan ekonomi keluarga. Hal ini mengakibatkan perempuan harus menanggung beban ganda di mana mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan juga mengurus kegiatan domestik rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan perempuan tidak mempunyai waktu untuk bersosialisasi/berpartisipasi di kegiatan desa.

Faktor budaya patriarki di masyarakat juga mempunyai pengaruh cukup besar dalam masalah domestifikasi perempuan. Budaya ini memunculkan stigma negatif bagi perempuan yang kerap keluar rumah untuk berpartisipasi di ruang publik. Pandangan bahwa perempuan seharusnya berada di rumah untuk mengurus keluarga pun masih kental terasa. Perempuan akan didukung untuk keluar rumah hanya untuk kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis. Hal ini membatasi ruang gerak perempuan di desa ini.

> "*Saya kalau keluar [rumah] dapat uang itu boleh. Kalau keluar nggak dapat uang itu nggak boleh." (Lastri, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

Budaya patriarki tersebut juga menempatkan laki-laki atau menantu laki-laki sebagai "anak emas". Di desa ini, seorang laki-laki tidak boleh melakukan pekerjaan berat, terutama pekerjaan domestik. Banyak faktor yang memengaruhi mengapa kondisi ini bisa terjadi. Salah satunya, pada saat seorang laki-laki melamar seorang perempuan, biasanya mereka membawa semua keperluan rumah tangga untuk mengisi rumah, sehingga terkesan seorang laki-laki telah "membeli" seorang perempuan. Hal inilah yang menyebabkan posisi tawar

perempuan lemah. Berbagai situasi yang dihadapi oleh perempuan menyebabkan partisipasi perempuan di ranah publik menjadi sangat terbatas. Jangankan berpartisipasi dalam kegiatan desa, mereka juga cenderung menghindari untuk datang ke Kantor Desa dan bertemu dengan perangkat desa.

> "*Nggak ngerti apa. Pokoknya ya, urusan, kita lihat pemerintah desa aja, ya. Kalau dia pakainya seragam terus, takut lho Mbak kita itu. Jangankan itu, lihat pemerintah desanya aja kita sungkan. Jadi kalau dulu itu Mbak, aduh, susah beneran. Kita itu bener-bener, kita masuk balai desa aja itu lho Mbak, jarang." (Indah, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

Keterbatasan partisipasi perempuan di dalam pemerintahan

Keterlibatan perempuan dalam struktur perangkat desa masih dibatasi oleh norma sosial yang mengedepankan peran laki-laki di ruang publik. Saat ini terdapat satu perempuan sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum di desa. Hal ini merupakan bentuk keterwakilan semata, bukan karena aspirasi perempuan yang memang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa. Perempuan yang menjabat sebagai Kaur Umum di desa ini sebenarnya terpilih sebagai Kepala Dusun. Pemerintah desa menganggap bahwa Kepala Dusun tidak bisa dijabat oleh seorang perempuan karena kurang mampu berinteraksi dengan masyarakat, sehingga beliau dipindahkan sebagai Kaur Umum. Penjabat Kaur Umum desa yang sebelumnya adalah laki-laki bertukar posisi sebagai Kepala Dusun.

> *"Jabatan saya kalau disesuaikan dengan SK itu sebenarnya Kaur Umum. Tapi kebetulan pas waktu ada yang kosong di desa itu kan ada warga sini itu juga mencalonkan diri sebagai perangkat desa itu jadi. Makanya pas waktu ada reposisi, saya itu dijadikan Kaur Umum. Tapi pas waktu ada calon jadi di sini itu orangnya yang dikirim perempuan. Makanya Pak Lurah itu ada inisiatif bahwasanya saya itu ditugaskan sebagai Kepala Dusun. Tapi SK tetap Kaur Umum. Yang jadi tadi SK-nya itu Kepala Dusun cuma direposisi karena dialihkan tugas. Iya, biar itu, maksudnya itu biar sama masyarakat itu bergaulnya mudah karena laki-laki kan mudah daripada perempuan." (Maryanto, Kepala Dusun, desa penelitian di Gresik, 3 Maret 2019)*

3. Pendirian dan Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Perempuan

Pendirian Sekolah Perempuan

Pendirian Sekolah Perempuan pada tahun 2013 dilakukan oleh KPS2K sebagai mitra KAPAL Perempuan dalam Program Gender Watch. Langkah awal untuk mendirikan Sekolah Perempuan adalah identifikasi perempuan miskin di desa yang dilakukan di dua level, yaitu desa dan kabupaten. Di level desa, KPS2K mencari data perempuan miskin melalui Pemerintah Desa. Di level kabupaten, KPS2K mencari data kemiskinan melalui program pengentasan kemiskinan untuk menunjukkan desa mana sajakah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

> *"Jadi kita cari yang memang dari data BDT (Basis Data Terpadu) itu yang paling tinggi angka kemiskinannya. Itulah di [desa penelitian] yang mempunyai wilayah terluas, penduduk terbesar dan kantong kemiskinannya tinggi di situ." (Bella, Staf KPS2K, Sidoarjo, 18 Februari 2019)*

Di level desa, pada awalnya KPS2K menghubungi pemerintah desa untuk dipertemukan dengan perempuan miskin di desa. Namun pemerintah desa justru mengarahkan KPS2K kepada anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mempunyai kesesuaian dengan kriteria perempuan miskin. Merespon kondisi tersebut, KPS2K melakukan kunjungan sendiri dari pintu ke pintu melakukan pemetaan perempuan miskin untuk menjadi bagian dari program dan mengundang mereka pada pertemuan yang diselenggarakan di balai desa.

Di level kabupaten, KPS2K menginisiasi dialog dengan pemerintah kabupaten, dalam hal ini BAPPEDA dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A), untuk memetakan upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Informasi tersebut akan

dilanjutkan untuk menemukan desa-desa di Kabupaten Gresik yang mempunyai angka kemiskinan tinggi. Melalui kesepakatan bersama dengan BAPPEDA dan Dinas KBP3A, KPS2K menentukan kecamatan dan desa yang menjadi target berdasarkan Basis Data Terpadu dan data sektoral dari Dinas KBP3A, serta data empiris yang dikumpulkan oleh tim KPS2K. Kecamatan Wringinanom dipilih sebagai lokasi karena tingkat kemiskinan yang tinggi. Kecamatan ini memiliki jumlah keluarga pra-sejahtera sebanyak 3.316 Kepala Keluarga dari total 19.046 Kepala Keluarga (BPS, 2012). Desa penelitian ini kemudian terpilih karena mempunyai wilayah terluas di kecamatan ini, memiliki jumlah penduduk terbesar di antara desa di kecamatan ini, dan merupakan desa dengan angka kemiskinan yang tinggi serta terletak di perbatasan Kabupaten Gresik dengan kabupaten lain.[9]

Setelah melakukan tahap identifikasi, KPS2K melakukan tahap perkenalan di kantor desa. Pada saat itu, perempuan miskin di desa ragu-ragu untuk hadir pada acara tersebut karena sebelumnya mereka jarang mendapatkan undangan kegiatan di kantor desa. Biasanya mereka akan ke kantor desa untuk mengambil bantuan. Kegiatan perkenalan ini sekaligus memberikan pemahaman awal kepada perempuan miskin tentang keadilan gender. Setelah pertemuan awal itu, dilanjutkan dengan pertemuan untuk pembentukan kelompok berdasarkan kedekatan lokasi rumah masing-masing perempuan sehingga terbentuklah delapan kelompok di desa.

Kegiatan Sekolah Perempuan

Secara garis besar, kegiatan Sekolah Perempuan terdiri dari pelatihan, kegiatan rutin berkumpul dan berdiskusi, serta advokasi. Pada tahun 2014, KPS2K melakukan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Perlindungan Sosial Tahap 1 dengan materi memetakan masalah perempuan, ketidakadilan gender dan kepemimpinan perempuan. Hasil dari pelatihan tersebut adalah menumbuhkan kesadaran perempuan terkait konsep gender, peserta mengetahui bentuk ketidakadilan gender dan dampak yang terjadi dalam kehidupan, menumbuhkan keyakinan untuk dapat menjadi pemimpin, dan memperkuat solidaritas antar perempuan miskin dalam komunitasnya.

Perempuan desa masih mengalami tantangan untuk terlibat dalam Sekolah Perempuan. *Pertama*, sulitnya perempuan untuk bergerak di ranah publik jika tidak membawa penghasilan ekonomi. *Kedua*, adanya stigma yang melekat pada kegiatan Sekolah Perempuan yang dianggap mengajarkan perempuan untuk melawan suami. Sebagai contoh, perempuan menghadapi tantangan ketika kegiatan pelatihan kepemimpinan dilakukan di luar desa, yaitu di sebuah hotel yang lokasinya tak jauh dari desa. Perempuan mendapatkan stigma negatif sebagai "perempuan yang tidak benar" karena ke luar rumah bukan untuk bekerja, seperti melakukan kegiatan di hotel.

> *"Dulu itu ya, kami itu mbak dicap itu tadi. Kalau kita sekolah [kegiatan Sekolah Perempuan] di luar misalnya di hotel, dianggap perempuan nggak bener. Dianggap itu, jangan ikut sekolah [Sekolah Perempuan] ini." (Lastri, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)*

> *"Saya nggak ikut Mbak untuk kepemimpinan perempuan tahap pertama itu, karena saya kan masih bingung. Kok diajak ke hotel? Pikiran saya kan aneh-aneh. Ngapain ke hotel? Pelatihan apa ke hotel itu? Terus kata suami saya, saya izin sama suami saya, kata suami saya gini, nggak usah ikut dulu. Kamu lihat aja nanti. Nek koncomu [Kalau temanmu] itu nggak diapa-apain. Gitu, saya lihat contohnya dulu. Saya nggak boleh ikut, jadi saya tahap pertama nggak ikut." (Lasinem, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)*

Tantangan selanjutnya adalah tidak semua perempuan mendapatkan izin dari suami untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sekitar 30% dari total perempuan yang diundang memilih untuk tidak hadir dalam kegiatan karena tidak mendapatkan izin dari suami dan masih belum yakin untuk mengikuti kegiatan Sekolah Perempuan.

[9] Bella. Staf KPS2K, Sidoarjo, 18 Februari 2019.

Suami tidak mengizinkan dan adanya rasa enggan untuk mengikuti kegiatan di Sekolah Perempuan disebabkan berkembangnya anggapan yang mengatakan Sekolah Perempuan mengajarkan untuk berani terhadap suami.

> *"Akhirnya dia itu bilangnya ke tetangga-tetangga sekitar, Sekolah Perempuan itu mengajari berani kepada suami. Jadi dengan pemahaman seperti itu diterapkan ke orang-orang, jadi salah seperti Mbak Indah ini, jadi salah kan. Mbak Indah ini jika mau mengajak orang-orang ikut sekolah, sampai dibilang gini, ada teman saya, diajak sekolah dengan saya. Dia itu pamitan sama suaminya, "Mas, saya ikut Sekolah Perempuan.", "Nggak usah ikut sekolah seperti Lastri. Sekolah kayak Lastri itu diajari berani sama suami.", sampai dia bilang gitu." (Lasinem, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

Anggapan di atas belum terungkap ketika KPS2K mengumpulkan data partisipasi di tahap awal. Informasi yang disampaikan dalam kegiatan Sekolah Perempuan, terutama pada tahap pertemuan yang membahas konsep gender memang menyajikan suatu penyadaran kritis terhadap keyakinan dan realitas yang dialami oleh perempuan miskin selama ini. Realitas permasalahan yang dialami perempuan baru terungkap setelah tahap identifikasi permasalahan perempuan.

Pada tahun 2015 KPS2K melakukan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Perlindungan Sosial tahap 2. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat perspektif gender dan pluralisme kelompok perempuan miskin penerima manfaat. Dalam pelatihan ini, beberapa perempuan yang tidak mengikuti pelatihan tahap I justru memutuskan hadir, misalnya adalah Lasinem. Pada pelatihan tahap 2 ini terjadi peningkatan jumlah peserta dibandingkan dengan pelatihan tahap 1. Perempuan yang sebelumnya masih belum yakin untuk terlibat dalam Sekolah Perempuan menjadi lebih termotivasi karena adanya cerita dari teman-temannya tentang pelatihan tahap 1. Selain itu, pada pelatihan tahap 2 ini terdapat anggota Sekolah Perempuan sudah mempunyai contoh untuk mendapatkan dukungan dari suami untuk ikut berkegiatan.

> *"Jadi teman-teman pulang dari tahap pertama itu kan ada sosialisasi ya ke pemerintah desa hasil training-nya itu, saya ikut. Kok kayaknya teman-teman itu senang semua ikut itu. Wah, aku kalah langkah. Saya tanya sama teman-teman itu, itu saya tanya, "Memang kamu di sana ngapain?". Ya sekolah terus, baca buku terus, berarti iki sekolah temen [berarti ini sekolah beneran]. Jadi membuat saya penasaran. Akhirnya di pelatihan kedua saya ikut. (Lasinem, Leader Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

Pada tahun 2016 Sekolah Perempuan berhasil mengikuti Musrenbangdes di balai desa. Sebelumnya, Sekolah Perempuan tidak pernah diundang dalam forum pengambilan keputusan di level desa, termasuk dalam kegiatan Musrenbangdes. Keikutsertaan Sekolah Perempuan dalam Musrenbangdes tidak lepas dari perjuangan KPS2K dan anggota Sekolah Perempuan untuk melakukan lobi terhadap pemerintah desa. Lobi dilakukan dengan menghubungi kepala desa secara intensif baik melalui telepon maupun dengan menemui kepala desa secara langsung agar diperbolehkan hadir dalam forum Musrenbang.

> *"Kemudian dalam Musrenbang itu, dari tahun 2016 kalau saya Musrenbang itu. Awalnya sih sama seperti teman-teman. Kayak kita itu nggak diundang, tapi kita itu selalu tanya ke desa, "Kapan Pak Musrenbang Desa itu? Kapan? Kapan?" jadi kan desa itu karena kita sering tanya, lama-lama kan pusing juga. Ternyata Sekolah Perempuan itu juga pingin. Akhirnya kami diundang. Tapi, beda sama Mbak Lastri. Memang usulan kita sama, sepuluh usulan itu. Tapi kalau Mbak Lastri itu, empat itu distop." (Endang, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

Sebelum Musrenbang, anggota Sekolah Perempuan melakukan pertemuan persiapan di Sekretariat KPS2K di Gresik, yang membahas dan mendiskusikan usulan-usulan yang akan dibawa ke Musrenbang. Pertemuan persiapan ini menghasilkan 10 prioritas kebutuhan perempuan, yang kemudian dibacakan pada saat mengikuti Musrenbang untuk diakomodasi oleh pemerintah desa. Sayangnya, pembacaan kebutuhan tersebut diberhentikan sebelum selesai karena dianggap terlalu panjang dan memakan banyak waktu. Selain itu, usulan

yang disampaikan oleh Sekolah Perempuan dianggap tidak sesuai dengan prioritas pembangunan desa pada saat itu.

> *"Akhirnya apa, usulan saya yang sepuluh itu lho nggak ada satu pun yang terealisasi, Mbak. Nggak ada. Yang terealisasi itu cuma pembangunan fisik, seperti jalan." (Lasinem, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

Pada akhirnya, usulan dari Sekolah Perempuan tidak terakomodasi karena pemerintah desa lebih mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah desa masih beranggapan bahwa pembangunan infrastruktur lebih terukur, baik dalam hal pembangunan maupun hasilnya.

> *"Pembangunan itu seberapa dengan melihat lokasi atau titik yang pembangunan infrastrukturnya sudah sedikit/banyak dipenuhi. Infrastrukur memang urgen, memang perlu dibenahi atau diperbaiki, mungkin pembangunan tetap prioritas, tapi pemberdayaan tetep ada porsinya." (Sutopo, Sekretaris Desa, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)*

Selain agenda pemerintah desa yang belum mengutamakan pemberdayaan perempuan, tantangan juga terletak pada aktor yang berada di pemerintah desa. Dalam pandangan pemerintah desa, kegiatan Sekolah Perempuan tidak menghasilkan sesuatu yang dapat diperhitungkan secara ekonomi sehingga pemerintah desa cenderung kurang mendukung. Oleh karena itu, Sekolah Perempuan melakukan upaya ke level yang lebih tinggi, yaitu di kecamatan dan kabupaten untuk mendorong agar Sekolah Perempuan terlibat dan dapat memberikan usulan dalam Musrenbang.

Tahun 2016 bertepatan dengan transisi Pemerintah Kabupaten Gresik, KPS2K melakukan pendekatan secara personal pada aparatur sipil negara (ASN) di BAPPEDA dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) yang sudah memiliki perspektif gender. Aktor-aktor tersebut dianggap memiliki pemikiran terbuka dan memiliki posisi yang cukup strategis, terutama kaitannya dengan penyusunan RPJMD dan memiliki kapasitas untuk menyampaikan tujuan KPS2K ke struktur birokrasi yang dapat diterima oleh pemerintah kabupaten. Pendekatan personal ini berhasil memunculkan nomenklatur "Fasilitasi Sekolah Perempuan" dalam APBD Dinas KBP3A tahun 2017, serta adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk melakukan replikasi Sekolah Perempuan di 10 desa lainnya di Kabupaten Gresik. Pertimbangan pemerintah kabupaten untuk melakukan replikasi adalah karena melihat keberhasilan Sekolah Perempuan di empat desa rintisan awal. Selain itu, pendekatan ke pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten berhasil membuat terobosan terkait permasalahan perkawinan anak, dengan terbitnya Surat Edaran Bupati tentang Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak.

> *"Kita mengajukan di Musrenbang tingkat kecamatan, Musrenbang tingkat kabupaten. Selama ini ya masih KPS2K itu yang gembor-gembor tentang stop pernikahan usia anak di kabupaten. Di kabupaten kita kan kerja sama dengan dinas-dinas di kabupaten, terus dikasih tau dampak dari pernikahan usia anak, akibat dari usia anak mengakibatkan kemiskinan pada perempuan, banyak perempuan yang mengalami KDRT, banyak perempuan yang mengalami angka kematian ibu, terus anak terlahir cacat, terus dijelaskan semua. Akhirnya di tahun 2018 ini Mbak ya, membuat surat edaran tentang stop pernikahan usia anak." (Lastri, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

Pada tahun 2017, Sekolah Perempuan terlibat dalam Musrenbang Kabupaten. Dalam hal ini, anggota Sekolah Perempuan menyampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk dapat menjamin keberlanjutan dari Sekolah Perempuan apabila program dari Gender Watch telah selesai. Selain itu, mereka juga mengajukan usulan untuk melakukan *papsmear* dan pemeriksaan Inspekasi Visual Asam Asetat (IVA) gratis bagi perempuan, pendataan Kartu Gresik Sehat yang partisipatif, program kejar paket ABC, hingga usulan pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi perempuan.

Pada tahun yang sama, KPS2K dan Sekolah Perempuan melakukan pelatihan fasilitator komunitas yang menjadi rangkaian Program Replikasi Sekolah Perempuan. Program Replikasi Sekolah Perempuan ini telah disahkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016-2021. Program Replikasi ini terwujud karena adanya kerjasama antara Pemerintah Gresik dengan KPS2K sejak tahun 2014 dalam pengembangan Sekolah Perempuan rintisan awal di empat desa, termasuk desa yang menjadi lokasi penelitian. Replikasi Sekolah Perempuan juga terwujud karena adanya komitmen Pemerintah Gresik dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender dalam program pembangunan.

> *"Melihat Sekoper [Sekolah Perempuan] yang cukup efektif dalam membantu meningkatkan kapasitas perempuan-perempuan yang ada di desa. Di sini kami ada 18 kecamatan Mbak, 330 desa, 26 kelurahan. Ternyata yang ada itu kan baru 15 maka kemarin saya instruksikan, di dalam rapat itu semua camat yang belum punya Sekoper [Sekolah Perempuan], segera mendirikan Sekoper [Sekolah Perempuan]. Kemudian desa-desa mana yang dianggap perlu mengutamakan Sekoper [Sekolah Perempuan] itu segera disampaikan laporannya. Kan kecamatannya ada 18 mba baru ada 7, mereka kurang 11. Kemudian desanya baru ada 15, maka saya support supaya ini bisa dikembangkan semua desa, sama dengan BUMDes." (Wakil Bupati, Gresik, 29 Februari 2019)*

4. Perubahan yang terjadi di desa karena keberadaan Sekolah Perempuan

Keberadaan Sekolah Perempuan telah membawa beberapa perubahan signifikan bagi kehidupan sehari-hari perempuan di desa lokasi penelitian. Secara individual, melalui kegiatan Sekolah Perempuan, perempuan mampu menguatkan kapasitas diri mereka untuk merebut kembali ruang kelola mereka. Secara kolektif, hal ini lalu membuka lebih lebar partisipasi perempuan di ruang publik, yang ditunjukkan dengan keterlibatan mereka di dalam Musrenbang. Peningkatan kapasitas politik perempuan juga memberikan bekal bagi mereka untuk memperjuangkan alokasi Dana Desa untuk kegiatan Sekolah Perempuan. Selain itu, perempuan desa juga terlibat dalam usaha advokasi legalitas keberadaan Sekolah Perempuan melalui perancangan peraturan desa.

4.1. Peningkatan Kapasitas Perempuan

Manfaat hadirnya Sekolah Perempuan sangat dirasakan oleh anggotanya. Sekolah Perempuan mengajarkan kepada perempuan untuk mampu mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas diri, termasuk menumbuhkan kesadaran kritis mengenai hak asasi perempuan dan keadilan gender. Anggota Sekolah Perempuan yang dulunya tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan umum saat ini mampu berkomunikasi dan berbicara di depan umum dengan baik. Selain itu, anggota Sekolah Perempuan juga mampu melakukan negosiasi dengan suami terkait pembagian kerja maupun berpendapat di dalam keluarga. Sebelum ada Sekolah Perempuan, perempuan di desa tidak mendapatkan hak berbicara dan hanya diperbolehkan tunduk kepada laki-laki atau suami.

> *"Dulu itu kalau suami mengamuk aku cuma bisa nangis nggak ngomong hanya dipendam saja, malah dia yang marah kalau aku hanya nangis saja. Sekarang aku bisa ngomong mbak, mungkin kayak ngomel, tapi sebenarnya omonganku benar, dulu nggak berani. Sekarang bisa diskusi-diskusi kecil." (Lasinem, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

> *"Terus di Sekolah Perempuan ada materi seks dan gender itu, ternyata iya, ya. Iya, ya. Yang bener itu yang mana? Yang dari kecil saya terima, saya pelajari itu. Apa yang ini, ya? Saya itu bingung. Di rumah itu saya kayak orang linglung. Masak itu saya kayak nggak selera masak. Sama suami itu kok kayak, kok kayak enek [tertawa]. Soalnya gitu, Mbak. Kan bingung saya. Koyok [kayak] anak kecil kan ngerti hak, ngerti HAM, sedangkan HAM-ku lah, hak asasiku. Terus ternyata, selama ini, saya itu tidak tahu hak saya itu sebenarnya. Saya itu tidak tahu. Terus yang masalah pekerjaan rumah tangga itu, ya. Iya ya, memangnya kenapa kalau suami saya nyapu? Masak kenapa?" (Lasinem, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

Selain itu, Sekolah Perempuan membantu anggotanya untuk lebih mampu menimbang dan berpikir mandiri mana yang baik dan mana yang buruk terkait dengan pengembangan diri maupun keluarganya, termasuk memaknai budaya yang ada di masyarakat. Bagi mereka, yang mampu dilakukan tetap dilakukan, namun apabila tidak mampu maka tidak dilakukan walaupun mendapatkan cemoohan dari orang lain.

> *"Terus Mbak, ya namanya budaya kan Mbak dari dulu seperti itu. Kalau anak perempuan di sini kalau lahiran anak perempuan itu kayak ari-arinya [plasenta] kalau cewek itu ditaruh di dalam dikubur di dalam, supaya harapannya kan supaya anak perempuannya tidak keluar, tidak jadi anak nakal, cabe-cabean*[10] *atau gimana seperti itu. Kalau anak laki-laki, lahiran anak laki-laki, ditaruh di luar soalnya dia kan bekerja, dia itu yang harus memimpin rumah tangganya. Nah, saya itu kan lahiran anak saya inikan saya sudah syukurlah perempuan, bukannya saya ini mau menentang budaya atau apa tapi sesuai keadaan saja saya lahiran ternyata anak saya laki-laki terus kan posisi rumah saya kan harus pasang lampu kan biasanya ari-ari kan gitu kan, Mbak. Polae kan lanang [karena kan laki-laki], disuruh kon jobo [di luar] saya bilang gini sama suami saya, "nggak apa meskipun laki-laki ditaruh di dalam. Nggak apa, harusnya malah enak kan nggak keluar-keluar rumah meskipun dia laki-laki." Iya, Mbak, ari-arinya ditaruh di dalam wiihh semua tetangga itu heboh, Mbak. "Delokken meneh anakmu [Lihatlah lagi anakmu], nak isin anakmu lanang mene ngene ngene ngene [nanti malu anakmu bakal begini begini]. Ya gara-gara masuk Sekolah Perempuan, gara-gara nentang budaya de'e ku[gara-gara menentang budaya dia itu]." Gitu, Mbak. Saya sih enjoy, Mbak hehe nggak popo, nggak masalah." (Lasinem, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)*

Sebelum mengikuti Sekolah Perempuan, ruang gerak perempuan yang sudah berkeluarga sangatlah terbatas. Perempuan tidak dilibatkan dalam kegiatan publik. Perempuan diizinkan untuk ke luar rumah oleh anggota keluarga laki-laki hanya apabila dengan alasan yang jelas. Jika tidak mendapatkan izin, maka perempuan tidak akan ke luar rumah. Rata-rata perempuan miskin di desa penelitian ini tidak tergabung dengan organisasi di desa. Setelah mengikuti Sekolah Perempuan, perempuan di desa dapat bernegosiasi lebih baik dengan keluarga (terutama suami).

> "*Pada saat kita itu sadar kalau itu kebutuhan, kebutuhannya si perempuan, ada aja jalannya untuk bisa berdiskusi dengan anak dan keluarga. Yang dulu saya nggak bisa meninggalkan anak saya di rumah, itu saya bisa bernegosiasi dengan suami." (Indah, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

> *"Ya kayak itu tadi mbak, kayak misalkan marah nggak seperti dulu, marah ya marah. Kan saya sekarang juga bernegosiasi, kalau dulu suami marah-marah saya ikut marah-marah, akhirnya bertengkar. Sekarang kalau suami marah-marah, aku biarkan dulu Mbak, kalau hatinya sudah dingin, baru kujelaskan." (Lastri, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)*

> *"Sebenarnya perempuan itu punya hak untuk mengambil keputusan, untuk mana yang salah mana yang benar, misalnya dalam lingkungan keluarga. Kemudian kita itu perlindungan sosial itu punya hak untuk memperjuangkannya, begitu. Sampai rumah, akhirnya saya terapkan." (Lastri, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

Hasil upaya peningkatan kapasitas yang paling menonjol dari Sekolah Perempuan yaitu perempuan mempunyai keberanian untuk mengeluarkan pendapat dan mempunyai banyak tambahan pengetahuan. Anggota Sekolah Perempuan mendapatkan pelatihan sehingga membuka wawasan mereka dan mereka selalu diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, sehingga yang semula pasif dan malu akhirnya menjadi berani berbicara di depan umum. Tentu saja keterampilan ini tidak pernah didapatkan oleh

[10] Cabe-cabean merupakan istilah yang merujuk pada fenomena remaja di Indonesia yang menggambarkan gaya hidup norak atau kampungan. Cabe-cabean awalnya merupakan salah satu bentuk pelabelan terhadap perempuan dengan perilaku tertentu, di mana istilah ini mulanya dikenal dikalangan para pembalap yang menyebut 'cabe' sebagai '*cewek alay bahan entotan*' (Karim dan Meulen, 2014). Selanjutnya istilah tersebut tersebar di masyarakat luas. Bagi masyarakat di lokasi penelitian, istilah cabe-cabean merujuk pada perilaku anak remaja (laki-laki maupun perempuan) yang berperilaku menyimpang.

perempuan miskin sebelumnya, jangankan berpendapat, bertemu dengan aparat pemerintah desa saja mereka awalnya takut.

> *"Pada saat diundang, ya udah kan ngumpul satu desa ngumpul di balai desa. Nah disuruh memperkenalkan diri, nah orang-orang yang nggak tau biasanya di rumah, disuruh memperkenalkan diri aja sudah gemetar kayak ketakutan gitu mbak."(Lastri, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)*

> *"Dulu kan cuma diam tidak berani bicara sama orang-orang." (Susanti, Perempuan Desa, desa penelitian di Gresik, 24 Februari 2019)*

Keberadaan Sekolah Perempuan memenuhi kebutuhan berorganisasi bagi perempuan miskin di desa yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Selama ini mereka sibuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mengurus kegiatan domestik. PKK yang selama ini dianggap sebagai representasi kelompok perempuan di desa ternyata tak mampu merangkul perempuan miskin. PKK hanya menjadi organisasi bagi perempuan elit desa yang kegiatannya lebih banyak untuk menyelesaikan kegiatan administratif.

> *"Ya biasanya kan istri-istrinya pemerintah desa. Tapi ya itu istri-istrinya orang menengah ke atas lah, Mbak. Cara masuk PKK gimana, nggak tau. Itu programnya PKK itu apa saja nggak ngerti." (Indah, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

> *"Makanya kayak PKK kemaren [kunjungan dari kabupaten], sama istri bupati., sampai dibilang gini, fungsinya PKK desa ini itu apa? Sampeyan [merujuk pada ketua PKK*[11]*] kok ngga ada fungsinya sama sekali. Rumah curhat [salah satu program kerja PKK] nggak jalan, ini nggak jalan, semuanya nggak jalan." (Lasinem, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 20 Februari 2019)*

Selama ini, interaksi antar sesama perempuan miskin terjadi saat mereka mengurus sawah maupun bercakap-cakap di sela-sela mengurus pekerjaan rumah tangga untuk membicarakan hal-hal ringan. Mereka tidak membicarakan persoalan rumah tangga karena dianggap tabu, padahal banyak dari mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai beban ganda, maupun mengidap penyakit terkait penyakit seksual. Sebelum ada Sekolah Perempuan, mereka relatif tertutup terkait persoalan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa persoalan yang terjadi di rumah tangga merupakan akibat dari kesalahan perempuan. Oleh karena itu, dengan adanya Sekolah Perempuan yang memfasilitasi perempuan miskin untuk berorganisasi dan berdiskusi dengan sesama perempuan menyebabkan kehidupan mereka menjadi lebih bahagia. Sebelumnya, mereka merasa tertekan karena menanggung beban seorang diri. Saat ini mereka dapat bertukar pikiran dengan sesama perempuan. Setelah adanya sekolah perempuan, mereka merasa bahwa masalah yang dialami oleh orang lain merupakan masalah mereka juga sehingga menimbulkan rasa empati, simpati dan saling tolong-menolong.

Perubahan lain yang terjadi pada anggota Sekolah Perempuan yaitu mereka lebih sadar untuk memperhatikan persoalan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Selama ini, kesehatan perempuan tidak mendapatkan perhatian serius baik oleh dirinya sendiri maupun keluarga terdekat. Menikah pada usia anak, gaya hidup yang kurang bersih dan sehat menjadi faktor yang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan dalam sistem reproduksi mereka, seperti keputihan, kanker serviks maupun penyakit sejenis lainnya yang selama ini tidak dirasakan. Dengan adanya Sekolah Perempuan, perempuan menjadi sadar bahwa kesehatan sistem reproduksi merupakan salah satu hak perempuan yang perlu diperjuangkan.

[11] Dalam hal ini, Ketua PKK (istri pertama kepala desa) tidak aktif dalam kegiatan PKK. Beliau hanya mengikuti beberapa kegiatan saja. Hal ini dikarenakan beliau dibatasi pergaulannya oleh suaminya (Sriyanti, Istri Kepala Desa, desa penelitian di Gresik, 24 Februari 2019).

Kisah Lastri memberikan gambaran bagaimana perempuan desa ini berupaya untuk memperjuangkan hak kesehatan reproduksinya. Ia terdiagnosa mengalami kanker serviks setelah sekian tahun mengalami gatal-gatal pada alat kelaminnya, yang selama ini hanya diobati secara tradisional. Bahkan setelah terdeteksi kanker, ia tidak mendapatkan persetujuan suami untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kepercayaan dirinya dan kesadaran atas haknya yang telah tumbuh semenjak mengikuti Sekolah Perempuan membuatnya berani untuk pergi ke rumah sakit walau tanpa dukungan suaminya.

> *"Nah terus akhirnya yang kedua itu, itu kan saya awalnya juga terdeteksi kanker serviks kan mbak, keputihan. Itu suami saya juga masih marah-marah. Saya disuruh jamu suruh gitu aja. Nggak boleh ke rumah sakit. Tapi saya berangkat sendiri dulu sama Mbak Indah [Leader Sekolah Perempuan] sama Mbak Nurul [Leader Sekolah Perempuan] yang bagian lapangan. Akhirnya kan untuk, terapi itu kan butuh tanda tangan suami, itu kan dia harus nggak kerja, itu saya dimarahi Mbak dari rumah sakit sampai rumah itu dimarahin terus. Saya nggak butuh tanda tanganmu [suami], saya nggak ngajak, saya bilang gitu mbak. Akhirnya yang kedua untuk kontrol itu saya berangkat sendiri, naik angkot." (Lastri, Leader Sekolah Perempuan desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)*

Salah satu hal lain yang telah berhasil diupayakan oleh kelompok perempuan ini yaitu menghadirkan tes Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) ke desa secara gratis sehingga perempuan di desa ini dapat memeriksakan diri. Kegiatan ini terselenggara setelah adanya kasus kanker serviks yang menimpa salah satu pimpinan Sekolah Perempuan di desa, yaitu Lastri, yang melakukan pemeriksaan mandiri. Setelah kejadian tersebut, Sekolah Perempuan melakukan diskusi dengan perempuan desa dan menemukan indikasi banyak perempuan desa yang mempunyai masalah terkait dengan kesehatan reproduksi, seperti peradangan maupun keputihan, yang selama ini tidak mendapatkan perhatian. Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) secara gratis pada akhirnya dapat dilakukan tiga kali, yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017, yang terselenggara berkat adanya jejaring antara Sekolah Perempuan, Rumah Sakit Ibnu Sina, Dinas KBP3A Kabupaten Gresik, dan instansi terkait lainnya. Awalnya para perempuan desa tidak berani untuk melakukan pemeriksaan karena selama ini menganggap bahwa masalah terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan merupakan hal tabu untuk dibicarakan atau diketahui orang lain. Selain itu, banyak laki-laki berpendapat bahwa organ reproduksi perempuan merupakan wewenang suami, yang masih banyak melarang perempuan untuk melakukan pemeriksaan. Sekolah Perempuan terus melakukan sosialisasi kepada perempuan di desa, sehingga banyak perempuan yang hadir untuk melakukan pemeriksaan, seperti yang diceritakan salah satu pimpinan Sekolah Perempuan lainnya, Endang, di bawah ini.

> *"Nah, dari situ saya sadar, dengan pemeriksaan IVA itu saya positif ada bercak putih, dan harus dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan terapi. Nah itu awalnya saya diskusi sama suami, sebenarnya nggak boleh. Ngapain dirujuk ke rumah sakit, apa lagi dibuka nanti sama dokter diobok-obok? Itu kan punya saya, kamu kan istri saya, ngapain kok dilihat orang lain? Tapi saya sadar Mbak, karena sudah melakukan pembelajaran di Sekolah Perempuan karena saya punya hak juga. Kalau saya tidak segera dirujuk ke rumah sakit, kan yang merasakan sakit kan saya. Jadi kan saya berhak mengambil keputusan untuk saya menjadi sehat. Nah itu kan pendidikan itu kan ada di Sekolah Perempuan itu. Bukan menjadi pemimpin di publik, tapi menjadi pemimpin dalam dirinya sendiri. Dalam mengambil keputusan, seperti itu sih." (Endang, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)*

Kisah Endang di atas juga menunjukkan bahwa perempuan di desa penelitian sekarang mulai memiliki kesadaran mengenai kesehatan reproduksinya dan dapat mengambil keputusan terhadap tubuhnya sendiri.

4.2. Keterlibatan Perempuan dalam Musrenbang Desa

Sekolah Perempuan berhasil mengikuti kegiatan Musrenbangdes, salah satunya mengikuti Musrenbangdes di tahun 2016. Pada saat itu, keikutsertaan Sekolah Perempuan di dalam Musrenbangdes belum berdasarkan undangan dari pemerintah desa, tapi sebagai hasil upaya Sekolah Perempuan untuk menghubungi pemerintah desa agar dapat menghadiri Musrenbangdes. Ketika pertemuan berlangsung, Lastri, salah satu *Leader* Sekolah

Perempuan sempat mengangkat tangan untuk membacakan usulan mengenai kebutuhan perempuan. Pemerintah desa mempersilahkan, namun karena panjangnya usulan yang dibacakan, Lastri tidak diberikan kesempatan oleh pemerintah desa untuk menyelesaikan penyampaian usulan tersebut. Tidak ada satupun usulan Sekolah Perempuan diakomodir karena pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur. Keterlibatan Sekolah Perempuan justru lebih terbuka di tingkat kecamatan. Sekolah Perempuan diundang sebagai perwakilan perempuan dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan pada tahun 2016. Pemerintah kecamatan merupakan bagian dari forum multipihak yang dibentuk dalam program Gender Watch. Keterlibatan Sekolah Perempuan dalam kegiatan ini penting untuk menjalin jejaring dalam mengadvokasi tahapan Musrenbangdes dan mengawal RAPBDes di tingkat kecamatan.

> "*Alhamdulillah, karena KPS2K itu kan bagaimana caranya perempuan ini bisa terlibat. Itu akhirnya kita diundang ke Musrenbang Kecamatan. Usulan saya yang sepuluh itu lho nggak ada satupun yang terealisasi di desa. Nggak ada. Yang terealisasi itu cuma pembangunan fisik, seperti jalan. […] Kemudian alhamdulillah kami diundang di Musrenbang Kabupaten. Kami diundang di Musrenbang […] Kecamatan sampai Kabupaten. Ternyata di Kabupaten itu enak, misalnya dibagi ini bidang apa, ini bidang Sumber Daya Manusia, ini fisik, ini pendidikan. [Setelah mengikuti Musrenbang di tingkat kecamatan dan kabupaten] alhamdulillah saya itu kok mudah sekali ya [mengajukan usulan] di tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Akhirnya alhamdulilah di kesehatan saya mengusulan tentang IVA [tes Inspeksi Visual Asam Asetat] gratis. Kemudian di bagian pendidikan itu kejar paket A, B, C. Kemudian saya mengusulkan lagi ambulan desa." (Lastri, Leader Sekolah Perempuan desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)*

Pada tahun 2017, Sekolah Perempuan diundang dalam Pertemuan Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah Dinas KBP3A Kabupaten Gresik untuk menyusun Rencana Kerja Dinas KBP3A tahun 2018. Kemudian tahun 2018, Sekolah Perempuan terlibat dalam Musrenbang Kabupaten Gresik dan berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik tahun 2019. Pada tahun 2019, Sekolah Perempuan terlibat dalam Musrenbang khusus perempuan di level kabupaten bersama dengan unsur eksekutif Perempuan, penegak hukum perempuan, organisasi/forum-forum perempuan, kader perempuan, PKK, tokoh agama perempuan, dan lain sebagainya. Kegiatan Musrenbang kabupaten khusus perempuan ini dilakukan untuk memperkuat Musrenbang reguler dan menampung usulan khusus perempuan yang selama belum terwadahi mulai dari Musrenbang desa hingga kabupaten. Keterlibatan perempuan miskin dalam forum-forum pengambilan keputusan untuk perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten dilakukan agar kebutuhan perempuan miskin diakomodadi dalam RAPBDesa dan RAPBD Kabupaten.

4.3. Alokasi Dana Desa untuk Kegiatan Sekolah Perempuan

Upaya yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan untuk mendapatkan Dana Desa yaitu dengan melakukan advokasi secara masif kepada aparat pemerintah desa, meningkatkan keterlibatan perempuan miskin dalam Sekolah Perempuan baik dalam jumlah maupun kapasitas diri mereka, mengembangkan jejaring untuk kegiatan Sekolah Perempuan dan membuktikan kepada pemerintah desa bahwa Sekolah Perempuan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Hal ini dilakukan agar pemerintah desa percaya bahwa Sekolah Perempuan membawa perubahan positif bagi masyarakat, dan pemerintah desa mau melibatkan Sekolah Perempuan dalam Musrenbangdes, serta mengalokasikan Dana Desa untuk Sekolah Perempuan. Sebelum terlibat dan suaranya didengar dalam Musrebangdes, Sekolah Perempuan justru mendapat perhatian dari Musrenbang kecamatan dan kabupaten. Dukungan dari kecamatan dan kabupaten menjadi alat untuk melakukan advokasi dan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah desa.

> "*Nah alhamdulillah dengan perjuangan kita mengikuti Musrenbang, akhirnya kita punya anggaran Dana Desa. Memang nggak sama, Mbak. Kan ada desa replikasi. Jadi di desa replikasi itu ada yang dapat Rp10 juta, ada yang*

Rp30 juta, ada yang dapat Rp20 juta, gitu. Kami di desa percontohan ini dapat Rp10 juta. Ya alhamdulillah yang awalnya kita nggak dipercaya, kan. Kita dipandang sebelah mata, dilihat orang miskin nggak mungkin diundang, [akhirnya] bisa mengusulkan. [Sebelum ada Sekolah Perempuan] nggak mungkin bisa ngomong apa-apa. Ternyata kita dapat Dana Desa di tahun 2017." (Lastri, Leader Sekolah Perempuan desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)

Pada tahun 2017, pemerintah desa menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp10 juta untuk kegiatan Sekolah Perempuan. Pengalokasian dana ini terjadi karena pendekatan *top-down* pada pemerintah desa. Keberhasilan advokasi dan dukungan dari kabupaten menjadi sarana untuk menekan pemerintah desa agar mengalokasikan Dana Desa. Alokasi dana tersebut digunakan oleh Sekolah Perempuan untuk membiayai kegiatan mereka, misalnya biaya transportasi jika mendapatkan undangan ke kabupaten, mengundang narasumber serta digunakan untuk konsumsi kegiatan.

Alokasi dana yang baru terealisasi pada akhir tahun 2017 membuat adanya kesulitan pembelanjaan dan administrasi pertanggungjawaban dana. Karena kesulitan ini, Dana Desa yang dialokasikan di tahun 2017 digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Sekolah Perempuan di tahun 2018. Dalam anggaran APBDes tahun 2018, Sekolah Perempuan tidak mengajukan usulan anggaran. Selanjutnya, pada tahun 2019, Sekolah Perempuan mengajukan usulan alokasi Dana Desa sebesar Rp20 juta, namun hanya disetujui sebesar Rp10 juta.

Jika dilihat total anggaran Dana Desa yang mencapai Rp1.012.993.000,00, dukungan pemerintah desa untuk Sekolah Perempuan sangatlah kecil. Di sisi lain, anggaran untuk PKK jauh lebih besar yaitu Rp30 juta, karena PKK akan mengikuti perlombaan yang membawa nama baik desa. Sebelumnya PKK menerima jumlah yang sama dengan Sekolah Perempuan, karena kebutuhan perlombaan, anggaran untuk PKK meningkat menjadi Rp30 juta. Prioritas penggunaan anggaran desa masih diutamakan untuk pembangunan fisik. Pemerintah desa menggunakan dalih Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) No. 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, yang menyatakan pembangunan infrastruktur disebutkan lebih dahulu dibandingkan dengan pemberdayaan perempuan. Hasil dari pembangunan fisik juga dinilai lebih terlihat secara kasat mata, sedangkan hasil dari pemberdayaan perempuan kurang terlihat. Walaupun perempuan sudah terlibat dalam Musrenbangdes, hal tersebut dimaknai sebatas sebagai keterlibatan perempuan dalam proses prosedural Musrenbangdes.

4.4. Upaya Advokasi untuk Melegalisasi Keberadaan Sekolah Perempuan melalui Peraturan Desa

Pada tahun 2019, Sekolah Perempuan melakukan asistensi dan advokasi kepada pemerintah desa dan forum multipihak mulai dari level desa hingga kabupaten dalam rangka untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa. Sekolah Perempuan telah mendapatkan alokasi Dana Desa, karena sudah masuk ke dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu Perdes Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDes 2017, Perdes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan APBDes tahun 2018, dan Perdes Nomor 5 Tahun 2018 tentang APBDes tahun 2019 dengan alokasi anggaran Rp10 juta. Hal ini berarti dukungan pemerintah desa terhadap Sekolah Perempuan sudah terbentuk, namun pada praktiknya belum optimal. Dukungan dalam hal pendanaan belum aman dan terjamin keberlanjutannya karena penyusunan Peraturan Desa masih membutuhkan pengawalan untuk memastikan adanya alokasi dana bagi Sekolah Perempuan. Faktor yang menghambat dukungan pemerintah desa antara lain pola pikir kepemimpinan desa yang masih belum mendukung pemberdayaan perempuan, terbatasnya kapasitas pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan sebagai dasar dalam mendorong adanya anggaran yang pro-gender, serta sistem tata kelola pemerintah desa yang belum demokratis. Selain itu adanya perubahan elit desa, seperti pergantian sekretaris desa dan Kepala Urusan

(Kaur) desa menyebabkan usaha advokasi dari Sekolah Perempuan harus dimulai dari awal lagi, dan kurangnya transparansi pemerintah desa dalam hal anggaran desa.

> "*Ya itu sekarang jadi PR kami gitu lho. Ini kan yang tahun ini kita mau menyusun rancangan Perdes sama SK untuk Sekoper. Sudah sering kita itu mencoba untuk mengundang mereka (Pemerintah desa) supaya mereka bisa membuka wawasan gitu lho terkait dokumen dll. Tapi malah yang pertemuan penting terakhir itu, itu mereka yang di empat desa itu tidak hadir, malah desa lain hadir. Mereka yang hadir malah paham akhirnya ngerti dan akhirnya mendukung pendanaan secara penuh." (Ajeng, Staf KPS2K, Sidoarjo, 6 Maret 2019)*

5. Pendekatan KPS2K untuk Membangun Kesadaran Keadilan Gender di Desa

KPS2K merupakan mitra dari KAPAL Perempuan dalam menjalankan program Gender Watch. Awal mula KPS2K bekerja sama dengan KAPAL Perempuan karena telah mempunyai kedekatan hubungan sebelumnya. Pendiri KPS2K merupakan aktivis yang awalnya bergabung dengan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Pada saat itu, KAPAL Perempuan sering mengadakan pelatihan dan dari situlah terjadi kedekatan hubungan antara pendiri KPS2K dan KAPAL Perempuan. Selain itu, pemilihan KPS2K sebagai mitra didasari oleh lolosnya KPS2K dalam asesmen organisasi yang dilakukan oleh KAPAL Perempuan dalam menyeleksi mitra di daerah, serta kesamaan ideologi feminis yang kuat. KPS2K yang bergerak untuk isu pendidikan, bersama dengan KAPAL Perempuan kemudian mendampingi perempuan miskin di desa untuk mendirikan Sekolah Perempuan.[12].

Pendekatan yang dilakukan oleh KPS2K untuk membangun gerakan kolektif perempuan miskin dilakukan dengan kombinasi dua cara, yaitu *bottom-up approach* dan *top-down approach*. *Bottom-up approach* dilakukan dengan memberikan fasilitasi, meningkatkan kapasitas perempuan, dan mendorong kesadaran perempuan akan hak-hak perempuan yang selama ini belum didapatkan. Sedangkan *top-down approach* dilakukan dengan mendorong adanya nota kesepahaman antara KPS2K-KAPAL Perempuan dengan Pemerintah Kabupaten terkait dengan isu pengarusutamaan gender, yang kemudian menjadi dasar kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan Dana Desa. Dua pendekatan yang dilakukan ini saling terkait, di mana ketika KPS2K menemui kendala di desa, pendekatan top-down digunakan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah desa.

Bottom-up approach

Pendekatan ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melakukan pendekatan kepada perempuan miskin, mendorong gerakan kolektif perempuan, dan melakukan pendekatan kepada pemerintah desa. KPS2K melakukan pemetaan perempuan miskin di desa dan mengajak hadir pada pertemuan awal di balai desa. Pertemuan awal ini dihadiri oleh 60% dari 80 perempuan yang diundang. Dalam pertemuan pertama tersebut, peserta yang hadir diajak untuk melakukan pemetaan masalah perempuan dan kebutuhan perempuan di desa. KPS2K juga menyampaikan informasi mengenai hak perempuan.

Tidak semua perempuan yang diundang hadir dalam pertemuan awal tersebut karena perempuan miskin di desa ini jarang (atau bahkan tidak pernah) mendatangi atau terlibat dengan kegiatan yang diselenggarakan di balai desa dan tidak memahami kegiatan yang diadakan. Bagi yang hadir, alasan mereka hadir adalah mengharapkan bantuan. Biasanya perempuan miskin desa mendatangi balai desa adalah untuk mengambil bantuan.

> *"Nggak ngerti apa. Pokoknya ya, urusan, kita lihat Pemerintah Desa aja, ya. Kalau dia pakainya seragam terus, takut lho Mbak kita itu. Jangankan itu, lihat Pemerintah Desanya aja kita sungkan. Jadi kalau dulu itu Mbak,*

[12] Ajeng. Staf KPS2K, Sidoarjo. 18 Februari 2019.

aduh, susah beneran. Kita itu bener-bener, kita masuk Balai Desa aja itu lho Mbak, jarang." (Indah, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 18 Februari 2019)

Tahap awal ini menjadi semacam cara untuk menjaring minat dan partisipasi perempuan desa. Tidak semua perempuan desa hadir dalam pertemuan selanjutnya. Selain mereka menyadari bahwa bukan bantuan ekonomi yang akan mereka dapatkan[13], upaya penyadaran kritis yang dilakukan KPS2K membawa efek kejut bagi perempuan desa karena menciptakan pemahaman yang sangat berbanding terbalik dengan kondisi yang mereka dapatkan sehari-hari. Pertemuan-pertemuan selanjutnya kemudian dihadiri oleh perempuan desa yang memang memiliki minat[14] untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang ditawarkan KPS2K.

Pada saat yang bersamaan, KPS2K melakukan pendekatan kepada pemerintah desa sehingga mendapatkan dukungan kegiatan dan pendanaan. Pendekatan kepada pemerintah desa sulit dilakukan karena pola pikir pemerintah desa tentang pemberdayaan perempuan yang belum terbangun dan fokus pemerintah desa yang lebih mengutamakan pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah desa cenderung kurang terbuka karena tingkat kesadaran dan sensitivitas gender yang masih terbatas. Namun demikian, pemerintah desa mempersilahkan KPS2K untuk melakukan kegiatan dengan perempuan miskin yang ada di desa dan melakukan pendataan partisipatif. Hasil pendataan yang dilakukan KPS2K inidiadopsi pemerintah desa sebagai bahan penyusunan RAPBDes dan menjadi sumber informasi terkait kebijakan terbaru dari pemerintah kabupaten, misalnya penganggaran dalam Undang-Undang Desa dan info perlindungan sosial yang dapat diakses oleh desa.

Tahap selanjutnya, KPS2K melakukan *live in* di desa selama dua tahun untuk meningkatkan kepercayaan, kekeluargaan, dan persaudaraan antara KPS2K dengan perempuan miskin di desa. Dengan melakukan *live in* ini, KPS2K dapat mengetahui bagaimana kehidupan perempuan miskin sehari-hari sekaligus melakukan pendataan terhadap masalah yang dialami oleh perempuan miskin. Kegiatan *live in* terbukti dapat meningkatkan kepercayaaan perempuan miskin terhadap KPS2K sehingga staf KPS2K dianggap sebagai bagian dari komunitas, menjadi tempat mencurahkan perasaan, dan menjadi orang kepercayaan di komunitas. Dalam proses ini, KPS2K juga memberikan informasi dan pengetahuan kaitannya dengan keadilan gender untuk membangun sensitivitas gender perempuan miskin desa.

Setelah kepercayaan dari perempuan miskin mulai terbangun, KPS2K melakukan pelatihan kepemimpinan dan perlindungan sosial yang dilakukan dalam dua tahap untuk menumbuhkan kesadaran perempuan miskin tentang keadilan gender sebagai dasar untuk membangun kepemimpinan perempuan dalam melakukan pemantauan program perlindungan sosial. Fokus pelatihan ini yaitu perempuan miskin dapat meningkatkan sensitivitas gender pada dirinya berdasarkan pengalaman, menjadi percaya diri terutama dalam hal berbicara di depan umum, dan mempunyai sifat kepemimpinan.

Dalam melakukan Program Gender Watch, strategi awal yang dijalankan yaitu melakukan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang melibatkan perempuan miskin untuk terlibat dalam melakukan pendataan persebaran kemiskinan, kondisi desa, hingga pemetaan masalah yang dialami oleh masyarakat. Strategi ini mampu meningkatkan partisipasi perempuan miskin karena selama ini mereka tidak pernah dilibatkan dan membangunan kelekatan hubungan antar perempuan miskin karena merasa mempunyai masalah yang sama.

[13] Sebelum KPS2K masuk di desa, perempuan miskin desa mendatangi kantor desa jika akan mendapatkan bantuan ekonomi, sehingga banyak perempuan miskin yang berharap akan mendapatkan bantuan ekonomi pada saat dilaksanakan pertemuan awal dengan KPS2K (Indah, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 18 Februari 2019).

[14] Sebelum minat ini terbentuk, awalnya beberapa perempuan miskin mengikuti kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh KPS2K karena penasaran, seperti yang dialami oleh Lasinem, maupun coba-coba, seperti yang dialami oleh Lastri. Namun, seiring dengan upaya yang dilakukan oleh KPS2K dalam membentuk kesadaran kritis perempuan miskin, maka minat untuk terus mengikuti kegiatan Sekolah Perempuan terbentuk (Lastri dan Lasinem, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019).

Tahapan ini dapat dikatakan sebagai tahap munculnya kelompok perempuan di desa yaitu Sekolah Perempuan.

Lebih lanjut, KPS2K melakukan penilaian kepada anggota Sekolah Perempuan berdasarkan kemampuan dan keaktifan untuk menjadikannya sebagai *Leader* Sekolah Perempuan. *Leader* ini yang menjadi penggerak kelompok perempuan miskin di level desa, membangun jejaring dengan pemerintah baik di level desa hingga provinsi, menginformasikan berita aktual, mendistribusikan pengetahuan, menjadi penghubung antara perempuan miskin dengan KPS2K, serta menjadi tempat berbagi dan berdiskusi antar sesama perempuan miskin.

Strategi selanjutnya adalah membangun jejaring antara Sekolah Perempuan dengan pemerintah kabupaten terkait penyediaan pelayanan perlindungan sosial kepada masyarakat yang kurang mempunyai akses, misalnya membantu pengurusan BPJS kesehatan, menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi di desa hingga menjadi agen bagi Dinas Sosial untuk melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin di desa. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan membuat KPS2K menjadi penghubung antara Sekolah Perempuan dengan dinas-dinas terkait.

Pada tahun 2015 KPS2K dan Sekolah Perempuan melakukan Kampanye Publik Gerakan *Gender Watch* yang dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik, dengan agenda utama pengesahan forum multipihak desa melalui penandatanganan bersama antara wakil bupati dan jajarannya, camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh kepala desa penelitian ini.

Di tahun 2015, forum multi pihak di desa belum terbentuk karena kesadaran gender dan kesadaran tentang pemberdayaan perempuan belum terbangun. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dikenal dengan UU Desa, nyatanya belum berlaku sepenuhnya di desa. UU Desa ini seharusnya memberikan peluang dalam upaya pemberdayaan desa, pembangunan desa, pembangunan perempuan maupun upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. UU Desa belum mampu menyentuh tata kelola pemerintahan di level desa. Dalam konteks ini, pelibatan dan pemberian akses perempuan terhadap informasi dan kegiatan publik masih sangat minim. Akibatnya masyarakat miskin tidak pernah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di desa, tidak mempunyai akses informasi dan semakin termarjinalkan.

> *"Yang pertama, kita kan nggak ngerti apa-apa, informasi kita nggak pernah dapet, kayak gitu, kan. Kalau informasi itu kita jarang dapet, gitu lho. Perempuan-perempuan. Karena apa ya, Mbak, mau cari informasi di mana juga kita nggak tau, kayak gitu. Yang tau ya kita mengharapkan Pemerintah Desa saja, gitu lho. Jadi kan susah. Dulu tuh, ya itu tadi, ke Balai Desa aja diundangnya jarang. Program apa yang masuk di Desa itu kita nggak ngerti apa-apa, yang penting dapet, ya udah. Kalau nggak dapet, tidak rejeki. Kan itu bantuan. Bukan hak, bantuan itu. Kan kayak gitu kita dulu itu." (Indah, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 18 Februari 2019)*

Sejalan dengan hal tersebut, KPS2K membentuk forum multipihak level desa yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, kader desa, dan aktor terkait yang aktif dalam forum atau kegiatan di desa. Forum multipihak desa ini menjadi jembatan antara Sekolah Perempuan dengan pemerintah desa terkait dengan kegiatan dan pendanaan. Pola pikir pemerintah desa terkait keadilan gender yang belum terbentuk mengakibatkan forum multipihak desa kurang berjalan. Oleh karena itu, KPS2K melalui *Leader* Sekolah Perempuan mendorong Sekolah Perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di level desa, dengan melakukan advokasi terhadap aparat desa agar terlibat dalam Musrenbangdes. Hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan pendekatan kepada aparat desa untuk dilibatkan pada Musrenbangdes. Pada tahun 2016 Sekolah Perempuan berhasil meyakinkan kepala desa agar mereka dapat hadir dalam forum

Musrenbangdes meskipun pada saat itu Sekolah Perempuan belum diberikan waktu untuk mengajukan usulan-usulannya. Selain Musrenbangdes, Sekolah Perempuan berhasil terlibat dalam Musrenbang Kecamatan Wringinanom. Advokasi yang dilakukan kepada pemerintah desa membuahkan hasil, sehingga mulai tahun 2017, Sekolah Perempuan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp10 juta dari Dana Desa, sebagaimana dijelaskan di bagian terdahulu.

Top-down approach

Pendekatan ini dilakukan oleh KPS2K untuk mendorong pemerintah kabupaten agar mendukung kegiatan Sekolah Perempuan. Pendekatan KPS2K di level kabupaten dilakukan di tahun 2013 selama kurang lebih satu tahun dengan pintu masuk berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disahkan di tahun sebelumnya. Pelaksanaan Perda PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan. KPS2K melakukan advokasi secara terus-menerus terhadap pemerintah kabupaten, khususnya Wakil Bupati Kabupaten Gresik, untuk mendorong penganggaran yang responsif gender. Adanya Perda PUG ini, menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik pada saat itu dianggap cukup peduli dengan isu gender.

Perda PUG ini dijadikan salah satu dasar hukum dalam mengimplementasikan program Gender Watch, yang juga terbantu dengan sikap terbuka pemerintah kabupaten. Tahun 2014, dilaksanakan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman Program *Gender Watch* antara KPS2K-KAPAL Perempuan dengan Pemerintah Kabupaten Gresik. Nota ini menjadi komitmen bagi kedua pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Gresik, untuk meningkatkan partisipasi dan menyelesaikan permasalahan sosial perempuan desa. Kerjasama tersebut menjadi wujud nyata pengaplikasian Perda Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gresik Nomor 4 tahun 2012.

Keberhasilan mewujudkan MoU tentu berdampak pada advokasi di level desa, di mana MoU tersebut menjadi kekuatan dan posisi tawar agar pemerintah desa mendukung dan mengalokasikan dana dalam kegiatan Sekolah Perempuan. KPS2K mendorong terbentuknya forum multipihak kabupaten dan desa, serta intens melakukan *coaching*, asistensi, audiensi dan *focus group discussion* terkait *gender mainstreaming* untuk OPD-OPD di kabupaten. Komunikasi yang intens juga tetap dilakukan dengan Wakil Bupati Gresik.

MoU dengan pemerintah kabupaten tidak serta merta membuat pemerintah desa mau mengalokasikan Dana Desa untuk Sekolah Perempuan. Selain pemahaman pemerintah desa terkait dengan konsep keadilan gender yang belum terbuka, pemerintah desa juga tidak mau menyalahgunakan Dana Desa jika tidak jelas basisnya. Keberhasilan Sekolah Perempuan masuk ke dalam nomenklatur di APBD Gresik menjadi landasan legal formal dalam memengaruhi pemerintah desa untuk mengalokasikan Dana Desa bagi Sekolah Perempuan sejak tahun 2017 yang tidak terlepas dari advokasi KPS2K terhadap peraturan bupati mengenai penggunaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi untuk alokasi Dana Desa di tingkat desa harus berjalan seiring advokasi terhadap peraturan di tingkat kabupaten mengenai penggunaan Dana Desa.

> *"Ya karena, kalau ini kan tahun 2017 itu karena Pak Bupatinya mendukung, karena kita juga membuktikan [dengan kegiatan Sekolah Perempuan]. Ini lho fungsinya Sekolah Perempuan itu apa, gitu lho. Jadi kita membuktikan ke kabupaten terus ya sama dinas-dinas itu tadi. Kita kan nggak hanya Sekolah Perempuan saja yang bekerja, ada yang namanya komite kabupaten. Komite pemantau kabupaten itu ada. Jadi ngambilnya dari dinas-dinas, jadi kita saling bekerja sama, begitu. Makanya di tahun 2017 itu. Awalnya kita kan mengikuti musrembang [desa]. Musrembang itu kita memang yang uber-uber itu Dana Desanya. Pada saat 2017 itu baru bisa direalisasi." (Indah, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 22 Februari 2019)*

6. Tantangan dan Peluang

Sejumlah faktor menjadi tantangan dan peluang bagi Sekolah Perempuan ke depan sebagai organisasi perempuan akar rumput. Tantangan pertama justru berasal dari internal Sekolah Perempuan di mana perlu adanya pembagian peran dan wewenang yang seimbang antar *Leader* Sekolah Perempuan sehingga tidak bertumpu pada satu atau dua individu saja. Hal ini mengingat jumlah *Leader* Sekolah Perempuan yang terbatas sehingga perlu memperhatikan kegiatan Sekolah Perempuan maupun kegiatan personal *Leader* Sekolah Perempuan, misalnya melahirkan, meninggal, dan lain-lain. Selama proses penelitian berlangsung, terdapat Leader Sekolah Perempuan yang melahirkan sehingga tidak aktif dalam kegiatan dan ada pula yang sedang hamil. Pembagian peran dan wewenang secara seimbang perlu dipertimbangkan mengingat terdapat *leader* yang lebih dominan dari yang lainnya sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan kurang terkoordinasi dengan baik jika tidak ada aktor tersebut.

Dari sisi anggota, perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas dan melakukan pendampingan yang intensif terhadap anggota. Masih banyak anggota yang meskipun telah memiliki pengetahuan tentang keadilan gender, namun belum mampu untuk mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Faktor budaya patriarki yang belum sepenuhnya hilang karena masih banyak laki-laki yang belum mempunyai sikap responsif terhadap gender. Kondisi ini tentu saja akan memengaruhi aktivitas Sekolah Perempuan ke depannya. Oleh karena itu, pendampingan dan upaya untuk meningkatkan kesadaran tidak hanya fokus pada perempuan saja, tetapi perlu pula mempertimbangkan laki-laki sebagai sasaran kegiatan responsif gender.

Sementara itu, dari sisi kades dan perangkat desa, yang belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap aktivitas dan pendanaan Sekolah Perempuan menjadi tantangan tersendiri. Pola kepemimpinan yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur menjadi tantangan bagi Sekolah Perempuan. Terpilihnya kembali kepala desa dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 menjadi tantangan bagi Sekolah Perempuan untuk terus melakukan advokasi dan komunikasi pada kepala desa untuk mendapatkan dukungan penuh bagi pelaksanaan kegiatan Sekolah Perempuan.

Di level pemerintah kabupaten, periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir pada tahun 2021, penting bagi Sekolah Perempuan untuk meningkatkan jejaring dan komunikasi aktif terhadap pejabat potensial di masa yang akan datang. Hal ini perlu diantisipasi karena pergantian atau restrukturisasi jabatan sering kali berpengaruh terhadap pergantian program dan kebijakan. Di level desa, Sekolah Perempuan telah merasakan adanya pergantian sekretaris desa yang menghambat alokasi anggaran untuk Sekolah Perempuan dan menghambat proses perizinan kegiatan Sekolah Perempuan.

Lebih lanjut, penting melakukan kegiatan berbasis ekonomi bagi anggota Sekolah Perempuan untuk menjamin kualitas kehidupan dan kesejahteraan anggota. Kegiatan penguatan ekonomi ini berkontribusi terhadap kehidupan ekonomi di desa, sehingga Sekolah Perempuan akan memengaruhi dukungan dari pemerintah desa pada Sekolah Perempuan untuk beraktivitas. Kegiatan berbasis ekonomi sebenarnya pernah dilakukan yaitu pengelolaan sampah dan pertanian organik, namun, belum berjalan secara optimal. Pengelolaan sampah masih berjalan dengan berbagai kendala, sedangkan pertanian organik sudah tidak berjalan karena memerlukan perawatan yang intensif. Sebenarnya kegiatan pertanian organik ini sudah pernah menghasilkan keuntungan secara ekonomi, sayangnya tidak berkelanjutan.

Tantangan terakhir terkait dengan dalam perubahan relasi laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik serta adanya akses perempuan dalam berbagai forum pengambilan keputusan. Harus diakui bahwa perubahan yang terjadi belum mampu mengubah struktur kekuasaan dalam kepemimpinan level desa. Faktor budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki lebih dominan daripada perempuan masih kuat, dan belum

sepenuhnya memberikan pengakuan dan peluang bagi perempuan miskin untuk berperan lebih banyak di ruang publik dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan di desa.

Peluang bagi Sekolah Perempuan yang paling dominan yaitu solidaritas antar anggota Sekolah Perempuan yang merasa senasib sepenanggungan sehingga menciptakan modal sosial yang kuat di antara mereka. Kekuatan ini tidak hanya untuk internal Sekolah Perempuan namun dapat menjadi potensi untuk melakukan advokasi terhadap pemerintah desa setempat kaitannya dengan penyusunan Perdes.

Replikasi Sekolah Perempuan di Kabupaten Gresik menjadi peluang bagi Sekolah Perempuan untuk mempertahankan eksistensi dan pengembangan diri. Sekolah Perempuan yang telah berjalan di desa ini menjadi rujukan bagi Sekolah Perempuan Replikasi untuk belajar dari pengalaman yang telah dilalui oleh Sekolah Perempuan. Replikasi Sekolah Perempuan menjadi bukti bahwa pemerintah kabupaten mengakui eksistensinya dan menjadi peluang untuk membangun jejaring yang lebih luas, misalnya advokasi bersama pemerintah kabupaten untuk menerbitkan Peraturan Gubernur terkait Sekolah Perempuan untuk jaminan keberlanjutan Sekolah Perempuan di masa mendatang.

7. Langkah Selanjutnya

Sekolah Perempuan membawa dampak perubahan terbukanya akses perempuan baik di ruang domestik dan ruang publik. Perjuangan panjang Sekolah Perempuan untuk meyakinkan sesama perempuan, keluarga, maupun pemerintah baik di level desa hingga kabupaten merupakan wujud bahwa kelompok kolektif perempuan telah terbangun. Proses tersebut juga menandakan bahwa proses pembentukan kesadaran kognisi perempuan miskin terkait dengan pemahaman keadilan gender telah berjalan dengan baik, meskipun belum mampu membawa perubahan institusional pemerintah desa. Pemerintah desa masih menunjukkan struktur kekuasaan yang patriarkis, dengan menghambat Perdes legalitas Sekolah Perempuan. Oleh karena itu perlu sejumlah strategi untuk advokasi Perdes di desa.

Pertama, strategi memetakan masalah, kebutuhan, dan potensi internal Sekolah Perempuan yang mempertimbangkan berbagai sumber daya, yaitu modal ekonomi, modal sosial, hingga modal sumber daya manusia. Tujuan dari pemetaan ini yaitu Sekolah Perempuan dapat menentukan arah kegiatan maupun program ke depan berdasarkan kondisi internal yang dimiliki saat ini sehingga mempunyai tujuan yang tepat.

Kedua, strategi memetakan struktur kekuasaan mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Strategi untuk mendapatkan peluang dari aktor-aktor potensial yang dapat membantu Sekolah Perempuan untuk menginternalisasi nila-nilai dan mendapatkan pengakuan secara institusional. Memetakan aktor strategis penting bagi Sekolah Perempuan dalam menghadapi kondisi struktural pemerintahan yang tidak terduga.

Ketiga, memperkuat posisi Sekolah Perempuan yang telah terjalin dengan lembaga formal di kabupaten yang diikuti dengan menginisiasi kegiatan atau program baru sehingga kerjasama tetap terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat strategi *lobbying*, misalnya dengan Dinas KBP3A di mana Sekolah Perempuan telah dilibatkan dalam proses penyusunan rencana program tahun 2018 yang lalu.

Keempat, memperkuat eksistensi Sekolah Perempuan dalam forum Musrenbang perempuan kabupaten dengan mengusung usulan-usulan kegiatan atau program strategis yang sesuai dengan visi pemerintah kabupaten setempat. Berkenaan dengan hal tersebut, Sekolah Perempuan perlu untuk mendiskusikan secara internal usulan kegiatan atau program yang pro terhadap pemberdayaan perempuan. Strategi *lobbying* juga diperlukan dalam konteks ini sehingga Sekolah Perempuan mendapatkan informasi yang jelas tentang arah program pembangunan kabupaten.

Kelima, menyusun kegiatan ekonomi produktif perempuan miskin sehingga mampu berdaya secara ekonomi dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan perempuan. Hal ini perlu dilakukan agar anggota Sekolah Perempuan tetap bertahan untuk bergabung, meskipun sejak awal anggota Sekolah Perempuan telah diberi pemahaman untuk tidak mengharapkan materi. Akan tetapi, kebutuhan ekonomi terus berjalan sedangkan dukungan dana dari pemerintah desa untuk kegiatan Sekolah Perempuan hanya Rp10 juta per tahun, sehingga perlu memikirkan keberlangsungan kehidupan Sekolah Perempuan dan personal anggotanya.

Penutup

Secara singkat, desa penelitian ini semula kurang kondusif karena terbatasnya kelompok-kelompok perempuan terutama bagi kaum marjinal, terbatasnya tingkat kesadaran dan sensitivitas gender bagi seluruh elemen aktor di tingkat desa, terbatasnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, dan bahkan belum adanya peraturan desa yang memprioritaskan perempuan yang diwujudkan dengan terakomodasinya kebutuhan dan prioritas perempuan. Kondisi ini tercipta karena sistem norma sosial di masyarakat yang mengakomodasi peran dominan laki-laki dalam ranah publik, sehingga perempuan hanya mendapatkan porsi dalam urusan domestik. Sejak adanya Sekolah Perempuan beberapa perubahan telah terjadi. Perempuan desa kini mengetahui hak-hak mereka dan memiliki kesadaran kritis mengenai berbagai tindakan ketidakadilan perempuan sehingga saat ini mampu bernegosiasi dan mempunyai posisi tawar terhadap laki-laki. Mereka juga kini mampu menunjukkan eksistensi diri mereka melalui partisipasi dalam forum pengambilan keputusan baik di tingkat desa hingga kabupaten. Lebih jauh, Sekolah Perempuan juga memberikan ruang bagi perempuan untuk membangun jaringan dukungan dengan sesama perempuan dan dengan tokoh masyarakat.

Jaringan dukungan ini berperan penting ketika Sekolah Perempuan menghadapi tantangan, baik secara individual maupun kelompok, karena masih adanya resistensi dari masyarakat khususnya laki-laki yang kurang mendukung agenda pemberdayaan perempuan. Dengan dukungan KPS2K dan KAPAL Perempuan, anggota Sekolah Perempuan melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten agar memberikan tekanan bagi pemerintah desa, yang berhasil mewujudkan alokasi Dana Desa bagi Sekolah Perempuan dan kegiatan pemberdayaan perempuan pada umumnya. Pendekatan *top-down* ini seiring dengan upaya yang masih berjalan terkait institusionalisasi keberadaan Sekolah Perempuan melalui penerbitan peraturan desa. Studi kasus ini memperlihatkan bagaimana upaya peningkatan kapasitas perempuan miskin desa dapat mengubah norma sosial yang membatasi gerak perempuan di ruang publik, walau secara parsial. Namun demikian, peningkatan kapasitas perempuan melalui Sekolah Perempuan tetap berperan penting dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan menjamin akomodasi hak-hak mereka di dalam kebijakan publik.

Bibliografi

BPS Kabupaten Gresik, 2012. Kabupaten Gresik Dalam Angka 2012, diakses 18 Januari 2020: <https://gresikkab.bps.go.id/publication/2012/11/08/7dbcd55f50dd1ebfdd4a6d85/kabupaten-gresik-dalam-angka-2012.html>.

BPS Kabupaten Gresik, 2018. Kabupaten Gresik Dalam Angka 2018, diakses 18 Januari 2020: <https://gresikkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/c0a1e4944778f8352de52cc2/kabupaten-gresik-dalam-angka-2018.html>.

Karim, I., dan Stanley, M., 2014. Cabe-Cabean: The Untold Stories. Loveable: Jakarta Selatan.

Pemerintah Desa, 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Penelitian. Gresik.